



**ANALISIS PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN
ASET PAJAK TANGGUHAN TERHADAP
MANAJEMEN LABA**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate dan
Konstruksi Bangunan yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia)**

Oleh:

Wisudaningtyas

NIM. 160810301140

**PROGRAM STUDI STRATA SATU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**ANALISIS PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN
ASET PAJAK TANGGUHAN TERHADAP
MANAJEMEN LABA**

(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi
Bangunan yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana
Ekonomi

Oleh:

Wisudaningtyas

NIM. 160810301140

**PROGRAM STUDI STRATA SATU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan menyebut nama Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk dan kesabaran dalam mengerjakan skripsi, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak Sugito dan Ibu Atmani yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan kasih sayang kepada penulis.
2. Kakak In Ratnawati, Dani Dwi Sagita, dan Febri Setiawan yang selalu menjadi penyemangat untuk segera menyelesaikan tugas saya ini.
3. Bapak Djoko Supatmoko dan Ibu Novi Wulandari yang telah membimbing selama pengerjaan skripsi.
4. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas dan para dosen yang telah memberikan ilmunya.
5. Sahabat-sahabat saya sejak Taman Kanak-Kanak sampai kuliah terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan bantuan yang telah diberikan.
6. Pada grup di *watsap* seperti *Dependent'team* dan Cah Ayu yang mampu memberi motivasi agar saya lebih giat.
7. Pada sahabat yang selalu saya repoti selama kuliah, Hilda, Deilla, dan Nayla.
8. Pada teman-teman yang berhasil membuat saya lebih semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al- Insyiroh : 6)

“Barang siapa yang keluar untuk mezari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali”

(HR. Tirmidzi)

“Perbedaan antara Impian dan Khayalan adalah bahwa mengkhayal melibatkan kemalasan, dimana seseorang tidak berusaha ataupun berjuang (untuk yang dia inginkan). Impian, akan mengharuskan seseorang berjuang, usaha dan tawakal”.

(Madaarij As-Salikin)

“Jangan mengeluh sebelum berjuang, Jangan putus asa selain berjuang, Bersyukurlah Allah masih memberi kita peluang”

(Muhaimin Rasul)

“Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan”

(Imam Syafi'i)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisudaningtyas

NIM : 160810301140

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Pengaruh Perencanaan pajak dan Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba, studi empiris pada Perusahaan Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 - 2017” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 April 2019
Yang menyatakan,

Wisudaningtyas
NIM 160810301140

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak dan Aset Pajak
Tangguhan terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada
Perusahaan Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 –
2017)

Nama Mahasiswa : Wisudaningtyas

NIM : 160810301140

Faultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Djoko Supatmoko, M.M Ak

NIP. 195502271984031001

Novi Wulandari, SE, M.Acc&Fin,Ak

NIP. 198011272005012003

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, SE, M.Si, Ak

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN ASET PAJAK
TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA (STUDI EMPIRIS
PADA PERUSAHAAN PROPERTI, REAL ESTATE DAN KONSTRUKSI
BANGUNAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2015 – 2017**

Oleh:

**Wisudaningtyas
NIM 160810301140**

Pembimbing:

**Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II**

**: Drs. Djoko Supadmoko, MM,Ak
: Novi Wulandari, SE, M.Acc&Fin,Ak**

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN ASET PAJAK
TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA (STUDI EMPIRIS PADA
PERUSAHAAN PROPERTI, REAL ESTATE DAN KONSTRUKSI
BANGUNAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015 – 2017)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Wiudaningtyas

NIM : 160810301140

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal :

8 April 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember,

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Bunga Maharani, S.E., M.SA. (.....)
NIP. 198503012010122005

Sekretaris : Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak. (.....)
NIP. 196701021992032002

Anggota : Indah Purnamawati, S.E., M.Si, Ak. (.....)
NIP. 196910111997022001

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.
NIP. 197107271995121001

Wisudaningtyas

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh dari Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Properti, *Real Estate* dan Konstruksi Bangunan periode 2015–2017. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan Properti, *Real Estate* dan Konstruksi Bangunan periode 2015-2017. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 15 perusahaan Properti, *Real Estate* dan Konstruksi Bangunan periode 2015–2017. Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian *asosiatif kausal* dengan pendekatannya yaitu kuantitatif. Metode pengambilan sampel yang dipakai adalah *purposive sampling*. Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, hipotesis dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perencanaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Properti, *Real Estate* dan Konstruksi Bangunan periode 2015-2017. Sedangkan Aset Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

Kata kunci: Perencanaan Pajak. Aset Pajak Tngguhan, Manajemen Laba.

Wisudaningtyas

Accounting Department, Economic and Business Faculty, University of Jember

ABSTRACT

This study aims to find out, test and analyze the effect of Tax Planning and Deferred Tax Assets on Profit Management in the Property, Real Estate and Building Construction companies for the period 2015-2017. The data used is secondary data collection in the form of company financial statements. The total sample of this study were 15 companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2015-2017. In this study, the type of explanatory research used short for quantitative. Data were analyzed by descriptive statistics, classic assumption tests, multiple linear regression, hypothesis testing and coefficient of determination. The results of this study indicate that tax planning does not affect earnings management. Whereas Deferred Tax Assets affect Earnings Management.

Keywords: Tax Planning, Deferred Tax Assets, Earnings Managemet.

RINGKASAN

Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2017); Wisudaningtyas; 160810301140; 2019; 82 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Informasi yang menunjukkan ukuran kinerja perusahaan salah satunya yaitu laba. Dalam menganalisis laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal, laba sering digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan seperti pemberian kompensasi dan pembagian bonus sebagai ukuran prestasi atau kinerja manajemen. Dalam menentukan laba, seorang manajemen mempertimbangkan beberapa hal salah satunya yaitu pajak. Sebagai wajib pajak perusahaan wajib membayar pajak kepada negara yang akan digunkanan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi besar katau kecilnya laba yang diperoleh perusahaan akan dipengaruhi oleh besar laba yang ditanggung perusahaan. Oleh karena itu, kualitas laba menjadi pusat perhatian bagi investor, kreditor, pembuat kebijakan akuntansi, dan pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak.

Pihak yang membutuhkan informasi laporan keuangan, pemangku kepentingan memiliki tujuan dan keinginan masing-masing. Mereka mempunyai siasat tersendiri agar mendapatkan keuntungan dari aktivitas perusahaan yang menghasilkan suatu laba. Dalam tujuan tersebut misalnya terdapat pertentangan dapat terjadi dimana pihak manajemen berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan, sedangkan pemegang saham berkeinginan untuk meningkatkan kekayaannya. Selain itu juga dimana pihak manajemen memiliki keinginan untuk membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pemerintah ingin memungut pajak yang sebesar-besarnya. Situasi inilah yang biasanya mendorong manajer untuk melakukan perilaku menyimpang dalam menyajikan dan melaporkan informasi laba tersebut yang dikenal dengan praktik manajemen laba (*earnings management*).

Dalam praktiknya pihak manajemen cenderung melakukan perencanaan

pajak untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan sehingga laba yang muncul kecil dan pengenaan pajak perusahaan tersebut juga kecil. Menurut Pohan (2013) perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Perencanaan pajak (*tax planning*) boleh dilakukan dan merupakan tindakan yang legal selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Maka ketika perencanaan pajak dilakukan dengan frekuensi sering maka mungkin saja praktik manajemen laba juga terjadi.

Adanya perbedaan saldo laba antara perusahaan dan fiskal menimbulkan ketidaksesuaian pada saldo akhir sehingga muncul adanya pajak tangguhan. Pajak tangguhan adalah perhitungan pengakuan aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan berdasarkan “konsekuensi PPh yang akan datang” yang timbul sebagai akibat adanya perbedaan basis nilai aset atau liabilitas antara penghitungan menurut akuntansi dan menurut pajak. Pajak tangguhan terdiri dari aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak. Aset pajak tangguhan ini seperti telah disebabkan yaitu Pajak Penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh dari Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan harga saham perusahaan Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 15 Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan periode 2015-2017. Metode pengambilan sampel yang dipakai adalah purposive sampling.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Perencanaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Properti, Real Estate dan Konstruksi bangunan periode 2015-2017. Sedangkan Aset Pajak Tangguhan berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba. Hal tersebut dibuktikan dari hasil pengujian uji t dari masing-masing variabel.



PRAKATA

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti, Real Estate Dan Konstruksi Bangunan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2017)”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Yosefa Sayekti M.Com., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak. Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Bapak Djoko Supadmoko, MM,Ak Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu serta dengan sabar memberikan inspirasi dan semangat kepada penulis sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Novi Wulandari, SE, M. Acc&Fin,Ak. Selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu dan dengan sabar membimbing penulis hingga penyusunan skripsi selesai;
6. Ibu Dewi Ayu Puspita S.E.,M.SA, Ak. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, saran, dan arahan selama masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Guru sejak Taman Kanak- Kanak hingga Sekolah Menengah Atas serta Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Jember khususnya pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah;

8. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya pada Jurusan S1 Akuntansi;
9. Kedua orang tuaku, Ayah Sugito dan Ibu Atmani yang senantiasa bekerja keras untuk membiayai kuliah saya, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati mencurahkan cinta, kasih sayang, semangat, dukungan, nasihat, dan do" a kepada penulis selama ini;
10. Kakak saya yang selalu menjadi penyemangat dan siap siaga mengulurkan bantuan.
11. Sahabat-Sahabat KKN 23 Desa Suger Kidul kecamatan Jelbuk kabupaten Jember.
12. Sahabat-Sahabat D3 Perpajakan UNEJ dan Akuntansi UNEJ 2013
13. Sahabat- Sahabat Alih Jenjang Akuntansi 2016
14. Keluarga Kos di Jalan Karimata V No. 16 Jember
15. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari seluruh pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 8 April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	x
RINGKASAN.....	xi
PRAKATA	xiiiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.2 Manajemen Laba	11
2.2.1 Teori Mannajemen Laba	12
2.2.2 Motivasi Manajemen Laba.....	14
2.2.3 Bentuk Manajemen Laba	15
2.3 Pajak	15
2.3.1 Fungsi Pajak	16
2.4 Perencanaan Pajak	16

2.4.1 Motivasi Perencanaan Pajak	17
2.4.2 Tahap Perencanaan Pajak.....	18
2.4.3 Aspek Perencanaan Pajak.....	19
2.5 Pajak Tangguhan	20
2.5.1 Aset Pajak Tangguhan.....	20
2.5.2 Penentuan Pajak Tangguhan	21
2.5.3 Pengukuran Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan.....	22
2.5.4 Pengakuan Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan	22
2.6 Laporan Keuangan.....	23
2.6.1 Pengertian Laporan Keuangan	23
2.6.2 Tujuan Laporan Keuangan	23
2.6.3 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan keuangan Fiskal .	24
2.7 Rekonsiliasi Fiskal.....	25
2.7.1 Teknik Rekonsiliasi Fiskal.....	25
2.7.2 Koreksi Positif dan Negatif Dari Rekonsiliasi Fiskal.....	26
2.8 Penelitian Terdahulu.....	27
2.9 Kerangka Pemikiran	30
2.10 Pembahasan Hipotesis	30
2.10.1 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba.....	30
2.10.2 Pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba.....	31
BAB 3. METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.3 Populasi dan Sampel.....	33
3.4 Definisi Operasional Variabel	35
3.4.1 Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>).....	35
3.4.2 Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>)	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Teknik Analisis Data	40

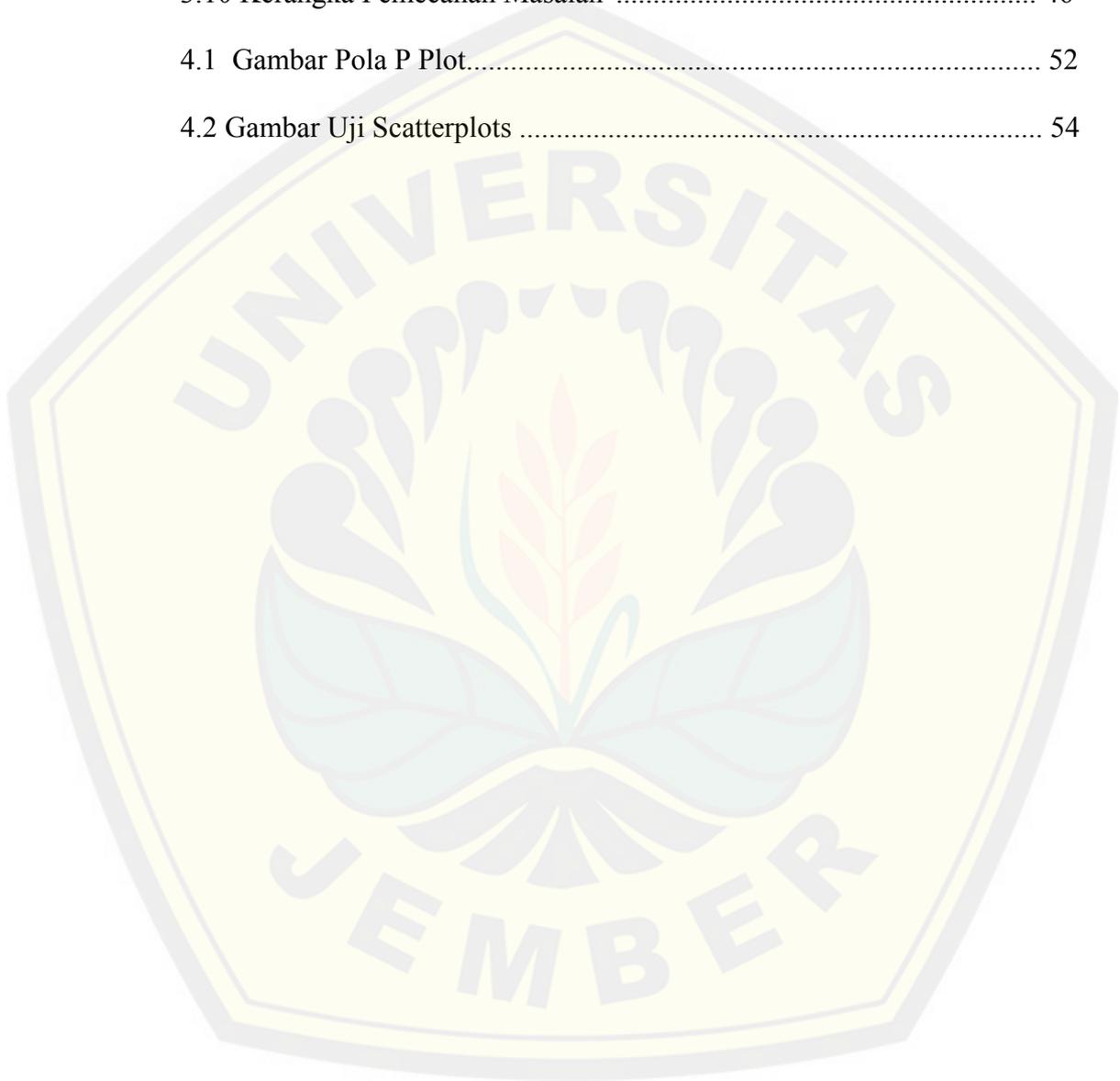
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	40
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	41
3.7 Analisis Regresi Linier Berganda.....	43
3.8 Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	43
3.9 Uji Hipotesis.....	44
3.9.1 Uji signifikansi Simultan (F).....	44
3.9.2 Uji Signifikan Parameter Individual (T).....	44
3.10 Kerangka Pemecahan Masalah.....	46
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	47
4.2 Analisis Data.....	48
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	48
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	49
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	50
4.2.2.2 Uji Multikolinieritas.....	52
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	53
4.2.2.4 Uji Autokorelasi.....	54
4.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	55
4.4 Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	56
4.5 Pengujian Hipotesis.....	56
4.5.1 Uji Statistik F.....	56
4.5.2 Uji T.....	57
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN.....	50
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	62
5.3 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

3.1 Kriteria Penilaian Perencanaan Pajak	38
3.2 Kriteria Aset Pajak Tangguhan	39
4.1 Kriteria Pemilihan Sampel.....	47
4.2 Hasil Statistik Deskriptif	48
4.3 Hasil Uji Normalitas sebelum transformasi data	51
4.4 Hasil Uji Normalitas sebelum transformasi data.....	51
4.5 Hasil Uji Multikolinieritas	53
4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	54
4.7 Hasil Uji Autokorelasi	55
4.8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	55
4.9 Hasil Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>)	56
4.10 Hasil Uji F	57
4.11 Hasil Uji Statistik T	58

DAFTAR GAMBAR

1.1. Kerangka Pemikiran.....	30
3.10 Kerangka Pemecahan Masalah	46
4.1 Gambar Pola P Plot.....	52
4.2 Gambar Uji Scatterplots	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Nama Perusahaan Sampel Penelitian

Lampiran 2. Perhitungan Manajemen Laba

Lampiran 3. Perhitungan Perencanaan Pajak

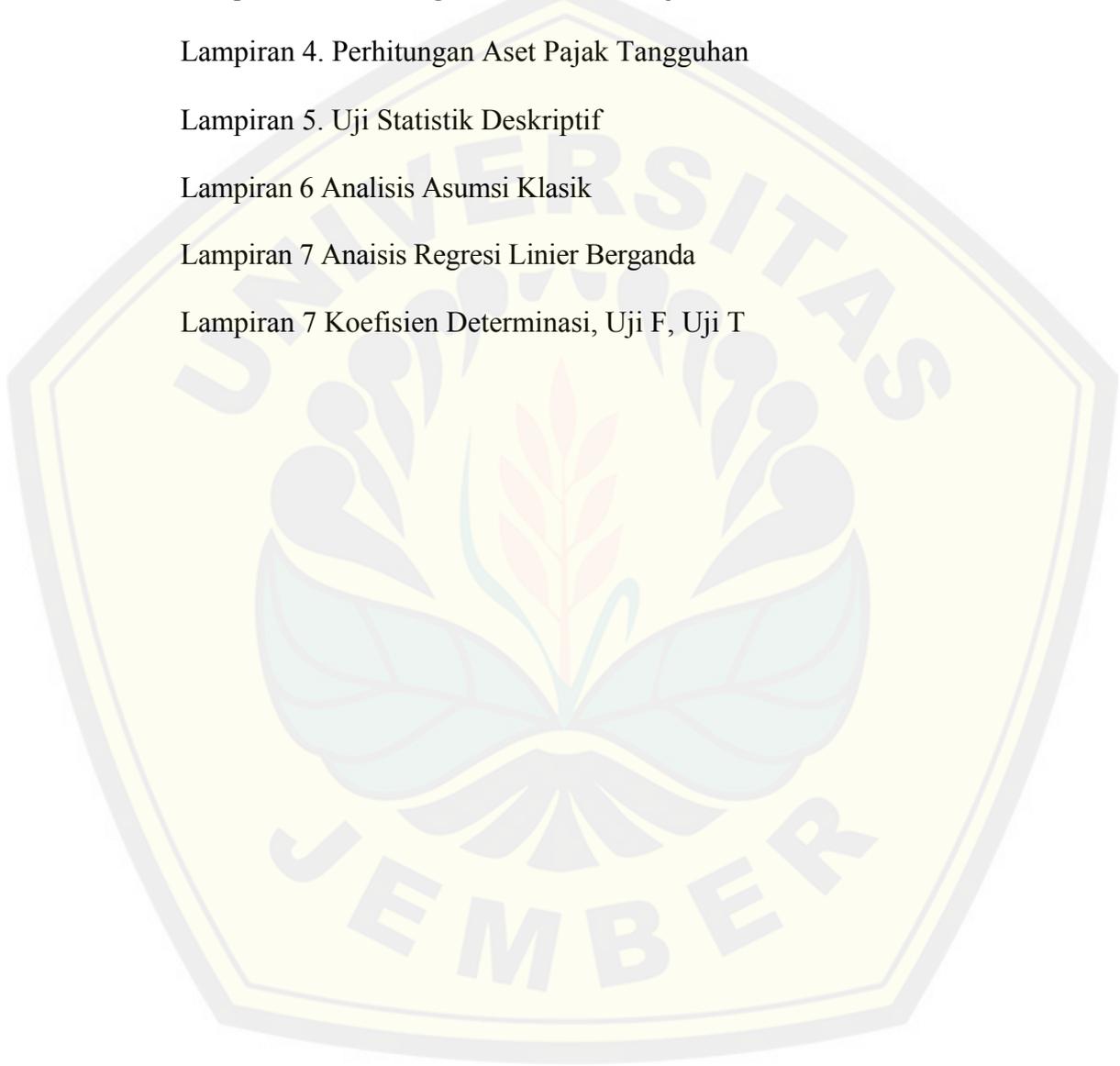
Lampiran 4. Perhitungan Aset Pajak Tangguhan

Lampiran 5. Uji Statistik Deskriptif

Lampiran 6 Analisis Asumsi Klasik

Lampiran 7 Analisis Regresi Linier Berganda

Lampiran 7 Koefisien Determinasi, Uji F, Uji T



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi yang menunjukkan ukuran kinerja perusahaan salah satunya yaitu laba. Dalam menganalisis laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal, laba sering digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan seperti pemberian kompensasi dan pembagian bonus sebagai ukuran prestasi atau kinerja manajemen. Dalam menentukan laba, seorang manajemen mempertimbangkan beberapa hal salah satunya yaitu pajak. Sebagai wajib pajak perusahaan wajib membayar pajak kepada negara yang akan digunkanan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi besar katau kecilnya laba yang diperoleh perusahaan akan dipengaruhi oleh besar laba yang ditanggung perusahaan. Oleh karena itu, kualitas laba menjadi pusat perhatian bagi investor, kreditor, pembuat kebijakan akuntansi, dan pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak.

Dalam rangka untuk kuat bersaing, perusahaan dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif dari perusahaan lainnya. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk dan layanan yang bermutu bagi konsumen, tetapi juga mampu mengelola keuangannya dengan baik, artinya kebijakan pengelolaan keuangan harus dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan dan hal tersebut ditunjukkan dengan besarnya laba yang dicapai suatu perusahaan.

Pihak yang membutuhkan informasi laporan keuangan, pemangku kepentingan memiliki tujuan dan keinginan masing-masing. Mereka mempunyai siasat tersendiri agar mendapatkan keuntungan dari aktivitas perusahaan yang menghasilkan suatu laba. Dalam tujuan tersebut misalnya terdapat pertentangan dapat terjadi dimana pihak manajemen berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan, sedangkan pemegang saham berkeinginan untuk meningkatkan kekayaannya. Selain itu juga dimana pihak manajemen memiliki keinginan untuk membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pemerintah ingin memungut pajak yang sebesar-besarnya. Situasi inilah yang biasanya mendorong manajer untuk melakukan perilaku menyimpang dalam menyajikan dan melaporkan informasi

laba tersebut yang dikenal dengan praktik manajemen laba (*earnings management*).

Manajemen laba adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*). Tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya (Fahmi, 2013:279). Sedangkan menurut (*National Association of Certified Fraud Examiners*, 1993, dalam Herdawati, 2015) mengartikan manajemen laba sebagai kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan keuangan mengenai fakta material dan data akuntansi, sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang pada akhirnya akan menyebabkan orang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya. Konsep mengenai manajemen laba dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*) yakni teori yang menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan (*principal*) dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kepentingan (*agent*). Konflik ini muncul pada saat setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya.

Untuk mewujudkan keinginan manajemen untuk tujuan dengan pihak ketiga seperti pihak kantor pajak, manajemen dapat memperindah laporan keuangan dengan perencanaan pajak yang diperbolehkan oleh aturan perundang-undang perpajakan. Dalam praktiknya pihak manajemen cenderung melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan sehingga laba yang muncul kecil dan pengenaan pajak perusahaan tersebut juga kecil. Menurut Pohan (2013) perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Perencanaan pajak (*tax planning*) boleh dilakukan dan merupakan tindakan yang legal selama dalam

koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Maka ketika perencanaan pajak dilakukan dengan frekuensi sering maka mungkin saja praktik manajemen laba juga terjadi.

Dalam membuat laporan keuangan laba rugi, perusahaan harus menyajikan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku serta kredibel dan informatif yang dapat berguna untuk pihak berkepentingan. Selain itu peraturan perpajakan juga harus menjadi syarat untuk menjadikan laporan keuangan itu baik bagi Direktorat Jenderal Pajak yang mencerminkan pajak yang sepatutnya dikenakan pada perusahaan tersebut. Dalam laporan keuangan laba rugi nantinya oleh fiskus membuat rekonsiliasi pajak yang dapat menimbulkan dua perbedaan jenis pajak penghasilan, yaitu laba sebelum pajak (perhitungan laba akuntansi menurut PSAK) dan penghasilan kena pajak (perhitungan laba fiskal menurut aturan fiskal). Adanya perbedaan saldo laba antara perusahaan dan fiskal menimbulkan ketidaksesuaian pada saldo akhir sehingga muncul adanya pajak tangguhan. Pajak tangguhan adalah perhitungan pengakuan aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan berdasarkan “konsekuensi PPh yang akan datang” yang timbul sebagai akibat adanya perbedaan basis nilai aset atau liabilitas antara penghitungan menurut akuntansi dan menurut pajak. Pajak tangguhan terdiri dari aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang muncul dikarenakan adanya hasil dari perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskus yang menyebabkan laba komersial lebih besar dari pada laba menurut fiskal, sedangkan liabilitas pajak tangguhan menunjukkan bahwa laba komersial lebih kecil daripada laba fiskal. Sehingga aset pajak tangguhan menyebabkan PPh akan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan sementara yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba rugi fiskal periode mendatang sehingga dalam hal ini mengurangi laba fiskal dimasa yang akan datang.

Aset pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak. Aset pajak tangguhan

ini seperti telah disebabkan yaitu Pajak Penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Dengan hasil laba perusahaan yang lebih besar maka aset pajak tangguhan menjadi harapan bagi menejer agar dapat menjadi manfaat dimasa depan untuk dapat dikompensasi atau dikembalikan.

Perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan merupakan hal yang berkasinambungan mengenai laba yang akan diperoleh oleh perusahaan, manajer yang menginginkan besarnya laba akan lebih memilih untuk perencanaan pajak yang baik demi memastikan pajaknya rendah dan dengan keinginan laba yang besar juga aset pajak tangguhan dari hasil rekonsiliasi dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dimasa depan. Dengan harapan tersebut manajer dapat saja melakukan praktik manajemen laba.

Fenomena perusahaan konstruksi dan bangunan yang terindikasi melakukan manajemen laba sebagai salah satu cara untuk memperindah laporan keuangan perusahaan yaitu pada PT. Waskita Karya terkait kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan tahun 2004-2008. Terbongkarnya kasus ini berawal saat pemeriksaan kembali neraca dalam rangka penerbitan saham perdana tahun 2008. Direktur utama Waskita yang baru, M. Choliq yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, menemukan pencatatan yang tidak sesuai, dimana ditemukan kelebihan pencatatan Rp. 400 miliar. Direksi periode sebelumnya diduga melakukan rekayasa keuangan sejak tahun 2004-2008 dengan memasukan proyeksi pendapatan proyek multi tahun ke depan sebagai tahun tertentu (Finola, 2016).

Fenomena manajemen laba yang dilakukan perusahaan konstruksi yang telah dijelaskan sebelumnya berdampak negatif karena rekayasa laporan keuangan yang mengakibatkan hasil tidak wajar dan menutupi keadaan sebenarnya perusahaan tersebut, namun beberapa hal manajemen laba juga boleh dilakukan untuk pada tingkat level tertentu memberikan informasi nilai keuangan yang baik dan efisien dengan penggunaan metode yang sesuai dengan aktivitas operasional perusahaan dan menjadi dasar pengambilan keputusan asal jika terjadi tidak ada pihak yang

dirugikan dalam melakukan manajemen laba.

Peneliti memilih sampel perusahaan Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan karena dalam ada pengenaan pajak secara final yang tidak bisa dikurangkan dalam rekonsiliasi karena maksud final tersebut yaitu selesai pada saat itu juga. pengenaan pajak penghasilan pada perusahaan konstruksi khususnya berlaku dengan tarif yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2008 yang menjelaskan klasifikasi perusahaan konstruksi dan tarif yang dikenakan ketika mendapatkan termin dalam suatu pengerjaan. Pajak penghasilan badan juga dikenakan karena terdapat pajak selain pajak final yang harus ditanggung maka perusahaan menggunakan tarif pajak penghasilan badan dengan tarif yang berlaku. Selain itu perusahaan ini dalam dekade belakangan ini perkembangan perusahaan sangat pesat dalam menghadapi persaingan global, selain untuk pembangunan sebagai sarana prasarana masyarakat juga pembangunan untuk menarik investor untuk menanamkan modal untuk investasi jangka panjangnya. Menurut data statistik triwulan III 2018 perkembangan perimntaan properti mengalami kenaikan, dalam tahunan kenaikan tumbuh 2,18% dibandingkan sebelumnya 1,97%. Kenaikan terbesar terletak pada segmen apartemen sebesar 8,51% terutama apartemen jual hampir di seluruh wilayah (www.bi.go.id survei properti komersial triwulan III-2018 | 17/12/2018). Sedangkan angka pasar konstruksi pada tahun 2018 meningkat 3%., dari data BPS dan Kementerian PUPR, angka pasar konstruksi ini meningkat sebesar 3% dibanding tahun 2017. Jadi tahun 2018 ini, total pasar proyek konstruksi diprediksi Rp 451 triliun, yang di mana 65% merupakan pekerjaan sipil dan 35% merupakan pekerjaan bangunan atau gedung. (www.finance.detik.com | 15/1/2018). Dalam saham sektor konstruksi dan bangunan juga membaik menandakan bahwa dengan kondisi saham yang dimiliki perusahaan itu baik berarti kemampuan perusahaan untuk lebih berkembang dan memberikan laba atau deviden kepada pemegang saham juga baik. Artinya bahwa kenaikan sektor konstruksi dan bangunan dalam tahun 2018 sangat banyak diminati oleh *stakeholder*. Data didapat dari laman internet yang memosting rekomendasi Hans (Direktur Investa Saran Mandiri) bahwa akumulasi beli terhadap saham-saham

sektor konstruksi. Saham pilihan yang dapat dikoleksi investor pada 2018 ialah WIKA, PTPP, WSKT, dan WTON. Dengan pertumbuhan yang pesat untuk tahun 2018 dan serangkaian pembangunan besar-besaran yang telah dilakukan mendorong para investor dalam menanamkan sahamnya, sehingga perusahaan konstruksi dapat mengembangkan dengan sejumlah kekayaan yang dimiliki agar lebih baik lagi dimasa depan.

Ada keterkaitan antara perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan yang seharusnya berhubungan dengan praktik manajemen laba, namun terdapat penelitian yang menghasilkan berbagai kesimpulan bahwa perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan tidak berpengaruh pada manajemen laba, maka *Research Gap* penelitian yang melatarbelakangi untuk melakukan penelitian sekarang yang mencari hal menarik dari sebagian penelitian terdahulu yang sudah melakukan penelitian dan akhirnya dapat menjadi landasan bagi penulisan tugas akhir ini. Penelitian yang dilakukan oleh Singkiati (2015) bahwa Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Penelitian yang dilakukan adalah menguji Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen laba. Dengan pengujian yang berbeda penelitian Rini (2018) juga menghasilkan Aset Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba, namun perencanaan Pajak menunjukkan adanya pengaruh terhadap manajemen Laba. Penelitian tersebut menguji tentang Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam perspektif Perencanaan pajak dan Aset Pajak Tangguhan.

Kedua hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriany (2016) yang menyatakan bahwa Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. Hasil tersebut dapat dilihat dari penelitiannya tentang Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013). Penelitian tersebut dapat diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh

Timurianan, Rizki (2015) yang menghasilkan penelitian tentang adanya pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut menjelaskan tentang Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba, serta penelitian Rini (2018) menghasilkan adanya pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba dalam penelitiannya yaitu Pengaruh Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI .

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Fitriany (2016) dengan judul “Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2013)” Penelitian sekarang ini melakukan pengujian dengan variabel independen yang sama dengan milik Fitriany (2016) yaitu perencanaan pajak dan Aset Pajak Tangguhan berbeda serta menggunakan objek penelitian pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2017. Dalam penelitian saat ini menggunakan sampel pengamatan perusahaan Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan selama 3 tahun, dengan periode tes 2015-2017. Sedangkan penelitian Fitriany menggunakan perusahaan manufaktur, karena peneliti ingin mendapatkan hasil pada perusahaan yang mempunyai aktivitas dan tingkat permintaan kontrak dengan perusahaan ini yang gencar digunakan untuk pembangunan.

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dalam mengolah data serta menggunakan pengukuran manajemen laba menggunakan *Discretionary Accruals* dengan Model Jones, model ini dapat diimplementasikan dalam runtun waktu (menggunakan runtun informasi perusahaan) atau dalam seksi silang (industri pada satu waktu tertentu) dalam Kustono (2009). *Discretionary accrual* (kebijakan akuntansi akrual) adalah suatu cara untuk mengurangi pelaporan laba yang sulit dideteksi melalui manipulasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan akrual. Surifah (2001) dalam Faradila (2013).

Pemilihan perusahaan pada penelitian ini yaitu perusahaan Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di BEI selama tahun 2015-2017 karena perusahaan properti dan real estate yang semakin berkembang bersamaan dengan industri konstruksi dan bangunan yang marak mendirikan berbagai pembangunan, perusahaan konstruksi khususnya mempunyai peraturan perpajakan tersendiri mengenai pajak penghasilan yang diatur dalam PP No 51 Tahun 2008, membahas mengenai penerapan tarif yang berlaku untuk klasifikasi perusahaan dan penerapan secara final, karena pajak penghasilan secara final menyebabkan koreksi pada rekonsiliasi fiskal tidak dapat dikurangkan sehingga dalam rekonsiliasi perusahaan hanya berlaku untuk selisih laba yang timbul dan diberikan tarif yang sama seperti tarif Pajak penghasilan badan. Hal ini menjadi perhatian bagi penulis untuk memilih perusahaan ini karena banyak celah yang dapat dilakukan untuk melakukan manajemen laba dengan upaya perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan pada perusahaan tersebut.

Dari beberapa penelitian terdahulu telah menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda sehingga menunjukkan hasil yang tidak konsisten terhadap pengaruh antar variabel, sehingga penulis ingin meneliti kembali dengan periode masa kini pada tahun 2015-2017 karena peneliti ingin mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini, selanjutnya agar peneliti mampu memberi hasil yang fokus pada spesifik perusahaan Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan hasil yang didapatkan akurat. Maka penulis ingin mengangkat skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka perumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut.

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji pengaruh perencanaan pajak dalam melakukan manajemen laba.
2. Untuk menguji pengaruh aset pajak tangguhan dalam melakukan manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sebuah pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu perpajakan tentang Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan yang dapat mempengaruhi manajer dalam melakukan Manajemen Laba.

- b. Bagi manajemen

Dapat dijadikan sebagai masukan bagi manajemen dalam meningkatkan perspektif positif dalam menghasilkan laporan keuangan terhadap kualitas laba akuntansi yang dilaporkan.

c. Bagi akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur atau referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai analisis Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan terhadap manajemen laba.



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pada bab ini akan berisi pendokumentasian dan telaah atas literatur serta hasil dari penelitian yang pernah dilakukan pada area yang terkait dengan tema penelitian ini. Selain itu dijelaskan dalam bab ini mengenai teori dan konsep yang digunakan untuk landasan pemahaman mengenai penelitian ini dan kerangka penelitian.

2.2 Manajemen Laba

Menurut Belkoui dalam Achmad Daengs (2014:201) pengertian manajemen laba yaitu:

“Earnings management adalah suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan. Hal ini adalah salah satu contoh yang mencolok dari akuntansi yang dirancang”.

Menurut Ilham Fahmi (2013:279) manajemen laba didefinisikan sebagai berikut:

“Earnings managemen (manajemen laba) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (company management). Tindakan earnings management sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya”.

Praktek manajemen laba dapat dipandang dua perspektif yang berbeda yaitu sebagai tindakan yang salah (negative) dan tindakan yang seharusnya dilakukan manajemen (positif). Manajemen laba dikatakan (negatif) jika dilihat sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan *political cost*, sedangkan manajemen laba disebut (positif) jika dilihat dari perspektif *efficient earnings*

management dimana manajemen laba memberikan manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga untuk kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

2.2.1. Teori Manajemen Laba

a. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep manajemen laba dapat dimulai dari pendekatan teori agensi (*agency theory*). Jensen dan Meckling dalam Herdawati (2015) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara manajemen (*agent*) dengan investor (*principal*). Pandangan *agency theory* yakni adanya pemisahan antara pihak *principal* dan *agent* yang menyebabkan munculnya potensi konflik yang dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Maksud dengan *principal* dalam teori keagenan ini yakni pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan sedangkan *agent* adalah manajemen yang memiliki kewajiban mengelolah perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan *principal* kepadanya (Sanjaya, 2004 dan Sulistyanto, 2004 dalam Herdawati, 2015).

Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan dapat ditunjukkan sebagai *a nexus of contracts* pemilik sumber daya. Hubungan keagenan dapat muncul ketika satu atau beberapa individual, mempercayakan pada satu atau beberapa individual, untuk melakukan beberapa tindakan dan kemudian mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan keagenan dalam bisnis biasanya tersusun atas dua bentuk hubungan yakni antara:

- 1) pemegang saham dan manajer; dan
- 2) antara pemberi utang dan pemegang saham.

Hubungan ini seringkali tidak harmonis, yang oleh teori keagenan disebut sebagai konflik keagenan, atau konflik kepentingan antara agen dan *principal*. Hal ini memiliki implikasi antara lain pada penatalaksanaan korporasi dan etika bisnis. Agen mengutamakan kepentingan sendiri, *principal* juga menginginkan kepentingannya tidak terganggu (Kustono, 2009).

2. Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Teori akuntansi positif merupakan teori yang mencoba untuk membuat prediksi yang bagus dari kejadian dunia nyata. Teori akuntansi positif berkaitan dengan memprediksi tindakan seperti pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer perusahaan dan bagaimana respon manajer tersebut terhadap standar akuntansi baru yang diusulkan (Scott, 2003). Menurut Watts dan Zimmerman dalam Herdawati (2015) Teori akuntansi positif yaitu berusaha untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Maksudnya, teori akuntansi positif dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Penjelasan dan prediksi dalam teori akuntansi positif didasarkan pada proses kontrak atau hubungan keagenan antara manajer dengan kelompok lain seperti investor, kreditor, auditor, pihak pengelola pasar modal dan institusi pemerintah. Selain itu, Watt dan Zimmerman dalam Herdawati (2015) juga mengaitkan *Positive accounting theory* dengan fenomena perilaku oportunistik manajer dengan membentuk tiga hipotesis yang melatarbelakangi perilaku oportunistik manajer tersebut, yaitu:

- 1) *Bonus Plan Hypothesis*, yakni manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus besar berdasarkan *earnings* lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan.
- 2) *Debt Covenant Hypothesis*, yakni manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba (Sweeney, 1994). Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal.
- 3) *The Political Cost Hypothesis*, yakni bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya (Scott, 2000).

2.2.2. Motivasi Manajemen Laba

Terdapat beberapa motivasi yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba yang dikemukakan oleh Scott (2003) dalam buku (Kustono, 2009) yakni.

1. Motivasi bonus, yakni manajer menampilkan profil laba yang sudah direkayasa untuk memperoleh bonus yang maksimal.
2. Motivasi kontrak, manajemen melakukan rekayasa laba laporan agar terhindar dari kovenan utang atau kegagalan secara teknis. Profil laba yang ditampilkan adalah sesuai dengan kontrak utang atau konvenannya.
3. Motivasi politik, manajer melakukan praktik manajemen laba untuk menghindari kos politik. Motivasi ini umumnya dialami oleh manajemen perusahaan yang besar dan strategis karena perusahaan semacam ini mengalami fenomena kos politik yang lebih besar dalam bentuk perhatian publik, aturan monopoli, atau biaya lobbying.
4. Motivasi pajak. Manajer melakukan praktik manajemen laba untuk meurunkan atau menaikkan pajak penghasilan sehingga sesuai dengan perencanaan pajak yang dilakukan.
5. Pergantian CEO (*Chief Executive Officer*). Pergantian manajer umumnya akan disertai dengan kemungkinan manajemen laba yang semakin tinggi. Manajer yang akan berhenti atau pensiun tentunya menghendaki memperoleh bonus yang maksimal. Manajer yang kurang sukses melakukan manajemen laba untuk memperbaiki tampilan kinerjanya. Manajer baru melakukan manajemen laba untuk menabung atau menyimpan laba yang akan dimasukkan dalam perhitungan kinerja periode mendatang.
6. Motivasi penawaran saham perdana (*Initial Public Offering (IPO)*). Manajer perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana melakukan manajemen laba untuk menampilkan profil laba yang lebih baik sehingga harga saham yang diperoleh lebih tinggi.
7. Motivasi informasi privat. Manajer melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk mengungkapkan informasi privat yang dimiliki perusahaan kepada investor dan kreditur.

2.2.3. Bentuk Manajemen Laba

Dalam melakukan manajemen laba, Pemilihan metode akuntansi harus dilakukan dengan penuh kecermatan oleh manajer agar tidak diketahui oleh pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu manajer harus memiliki strategi agar manajemen laba yang dilakukan tidak diketahui pihak luar. Adapun bentuk-bentuk manajemen laba yang dikemukakan oleh Scott dalam Herdawati (2015) yaitu:

- a) *Taking a bath*, yakni dilakukan manajer dengan cara menggeser biaya akrual *discretionary* periode mendatang ke periode kini atau menggeser pendapatan akrual *discretionary* periode kini ke periode mendatang. Hal ini dilakukan manajer untuk memaksimalkan kompensasi atau bonus yang akan diterimanya pada tahun berikutnya karena menghadapi kenyataan bahwa bonus tahun ini tidak dapat diterima.
- b) *Income minimization* (minimisasi laba), yakni dimaksudkan untuk keperluan pertimbangan pajak dengan meminimumkan kewajiban pajak perusahaan.
- c) *Income maximization* (maksimisasi laba), yakni dimaksudkan untuk memaksimalkan bonus manajer, menciptakan kinerja perusahaan yang baik sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (pertimbangan pasar modal), menunda pelanggaran perjanjian utang, dan manajer dapat memperoleh kendali atas perusahaan.
- d) *Income smoothing* (perataan laba), yakni tindakan dimana manajemen memperhalus fluktuasi laba dari periode ke periode dengan cara memindahkan laba dari periode yang memiliki laba tinggi ke periode yang memiliki laba rendah.

2.3 Pajak

Pengertian pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP adalah sebagai berikut:

”Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penerimaan negara yang terbesar adalah dari pajak maka pemerintah Direktorat Jenderal Pajak bahwa pajak sebagai sumber pendapatan untuk pembangunan negara sedangkan perusahaan harus membayar sebagai beban pajak yang harus diperhitungkan besarnya yang akan di sampaikan kepada pemerintah.

2.3.1. Fungsi Pajak

Menurut Halim *et al.* (2014:4), terlihat adanya dua fungsi pajak sebagai berikut.

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pembangunan.

Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh pajak sebagai fungsi mengatur adalah.

- 1) Memberikan insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
- 2) Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

2.4 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Pohan (2013) menjelaskan bahwa perencanaan pajak (*tax palnning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha

sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan oleh perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

2.4.1 Motivasi Perencanaan Pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak yang dapat terjadi adanya upaya meminimalkan kewajiban pembayaran pajak (diolah dari TN Srinivasan, "Tax Evasion: A Model", dalam *Journal of Public Economics*, 1973: 339-346) dalam Pohan (2014: 18) sebagai berikut:

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan (*Complexity of rule*)
Makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) menjadi tinggi.
2. Besarnya pajak yang dibayar (*Tax required to pay*)
Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.
3. Risiko deteksi (*Probability of detection*)
Risiko deteksi ini berhubungan dengan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah risiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.
4. Besarnya denda (*Size of pinalty*)
Makin besar sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar.

5. Moral Masyarakat

Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak yaitu untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atau suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama dengan memanfaatkan:

- 1) Perbedaan tarif pajak;
- 2) Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak;
- 3) *Loopholes, shelters, dan havens.*

2.4.2 Tahap Perencanaan Pajak

Dalam Herdawati (2015) menyebutkan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai harapan, maka rencana harus dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menganalisis informasi yang ada, yakni dengan menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek yang menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Selain itu, juga harus memperhatikan faktor baik internal maupun eksternal yaitu berupa:
 - 1) fakta yang relevan;
 - 2) faktor pajak;
 - 3) faktor non-pajak lainnya.
- b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak
- c. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak, yakni untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternative perencanaan.
- d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak, dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus

sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.

- e. Memutakhirkan rencana pajak, karena meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian.

2.4.3. Aspek Perencanaan Pajak

Dalam buku perencanaan pajak (*tax planning*) dalam Herdawati (2015) sebagai langkah peningkatan kepatuhan dan efisiensi pajak, dijelaskan beberapa alternatif untuk mengolah variabel-variabel kritis tersebut, yakni melalui aspek-aspek:

- a. Proyeksi pajak, yakni perencanaan pajak dapat dilakukan melalui suatu proyeksi. Proyeksi pajak ini dapat berupa proyeksi arus kas, laba rugi, atau proyeksi atas rencana-rencana perusahaan.
- b. Bentuk usaha, yakni bentuk usaha juga berpengaruh pada pemajakan, bentuk usaha contohnya: PT, Koperasi, CV dengan modal yang terdiri dari saham, firma, persekutuan atau perorangan.
- c. Bidang usaha, yakni bidang usaha tertentu yang memperoleh perlakuan perpajakan yang berbeda, misalnya untuk perusahaan konstruksi dikenakan pajak penghasilan sebesar 2% dari penjualan dan bersifat final berdasarkan peraturan pemerintah No.140 tahun 2000 tentang PPh atas penghasilan dari usaha dari jasa konstruksi yang ditetapkan tanggal 21 desember 2000 dan keputusan menteri keuangan No.559/KMK.04/2000 yang mulai berlaku 26 desember 2000. Jika perusahaan memperoleh laba bersih yang cukup besar lebih dari 10%, maka pengenaan pajak penghasilan sebesar 2% ini menguntungkan.
- d. Pengawasan dan atau pemeriksaan pajak
Direktorat jendral pajak akan melakukan pemeriksaan pajak dengan tujuan untuk:
 - 1) Menetapkan pajak-pajak negara terhutang.
 - 2) Menetapkan besarnya kerugian yang dapat dikompensasikan dengan saldo laba tahun berikutnya.

e. Kebijakan Akuntansi

- 1) Penilaian persediaan, yakni kebijakan akuntansi mengenai persediaan mensyaratkan menggunakan FIFO atau *Average Method*, sedangkan LIFO tidak diperkenankan dalam ketentuan perpajakan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir disebut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 selanjutnya dalam tulisan ini disebut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yaitu pasal 10 ayat 6 adalah “persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai dengan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama”.
- 2) Sewa guna usaha, yakni sewa guna usaha (*leasing*) aktiva tetap juga sangat menguntungkan dari segi beban pembayaran angsuran. Dari segi pemajakan, aktiva tetap sewa guna usaha tidak boleh disusutkan, tetapi beban angsuran lebih besar dari beban penyusutan, maka pembebanan pajaknya dapat menjadi lebih kecil.

2.5 Pajak Tangguhan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 bertujuan mengatur perlakuan untuk PPh saja, khususnya pengakuan, pengukuran, dan pencatatan beban pajak, aset dan liabilitas pajak tangguhan dan aset dan liabilitas pajak kini. Direktorat Jenderal Pajak tidak berkepentingan pada PSAK Nomor 46. Wajib pajak menerapkan PSAK Nomor 46 dalam rangka penyusunan laporan keuangannya.

2.5.1 Aset Pajak Tangguhan

Menurut PSAK No.46 (IAI, 2009: 8) Pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan temporer antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang.

Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan.

Dalam B. Ilyas dan Priantara (2014, 26) pajak tangguhan terdiri atas:

1. Liabilitas pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*), yaitu jumlah PPh yang terhutang untuk periode mendatang (*payable*) sebagai akibat adanya perbedaan sementara yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*future taxable amount*) dalam perhitungan laba rugi fiskal periode mendatang pada mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas dilunasi.
2. Aset pajak tangguhan (*deffered tax asset*) yaitu jumlah PPh yang akan yang akan terpulihkan pada periode mendatang pada periode mendatang (*recoverable*) sebagai akibat adanya (1) perbedaan sementara yang boleh dikurangkan (*future deductible amount*) dalam perhitungan laba rugi fiskal periode mendatang (mengurangi laba fiskal dimasa yang akan datang) pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas dilunasi dan (2) sisa kompensasi kerugian apabila laba fiskal dimasa datang memadai untuk dikompensasi.

2.5.2. Penentuan Pajak Tangguhan

Penentuan pada Pajak Tangguhan dalam Herdawati (2015) adalah sebagai berikut.

1. Untuk Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Liabilities*), yaitu pengakuan aset atau kewajiban Pajak Tangguhan didasarkan pada fakta bahwa adanya kemungkinan pemulihan *asset* atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau lebih besar. Akan tetapi, apabila akan terjadi pembayaran pajak yang lebih besar dimasa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu kewajiban.
2. Untuk Asset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset*), yaitu dapat diakui apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang

akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu aset. Dengan kata lain apabila kemungkinan pembayaran pajak dimasa yang akan datang lebih kecil akan dicatat sebagai aset pajak tangguhan.

2.5.3. Pengukuran Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

Dalam aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui sebesar jumlah pajak terhutang (restitusi pajak), yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan berlaku di masa mendatang pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi. Apabila tarif pajak yang berlaku berbeda untuk tingkat laba fisik yang berbeda maka aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak rata-rata yang akan dikenakan terhadap laba fiskal (rugi pajak) pada saat perbedaan temporer membalik (*reverse*). Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak boleh didiskonto (*discounted*) Nilai tercatat aset pajak tangguhan harus ditinjau kembali (pada tanggal Laporan Posisi Keuangan). Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus mencerminkan konsekuensi pajak untuk pemulihan nilai tercatat aset atau penyelesaian liabilitas yang diharapkan perusahaan pada tanggal Laporan Posisi Keuangan. Perusahaan harus menurunkan nilai tercatat tersebut apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai.

2.5.4. Pengakuan Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

Entitas harus mengakui liabilitas atau aset pajak tangguhan apabila pembayaran pajak pada periode masa depan lebih besar atau lebih kecil daripada yang diharapkan jika tidak terdapat konsekuensi pajak. Aset pajak tangguhan diakui sepanjang diperkirakan akan tersedia laba kena pajak atau perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah yang memadai.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan muncul karena penghasilan atau beban diakui dalam penghitungan laba akuntansi pada periode yang berbeda dari periode pengakuan penghasilan atau beban tersebut dalam penghitungan penghasilan kena

pajak (rugi pajak). Pajak tangguhan yang berasal dari aset dan liabilitas pajak tangguhan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

Nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan mungkin berubah walaupun tidak ada perubahan jumlah perbedaan temporer yang terkait dengan aset dan liabilitas pajak tersebut. Perubahan tersebut mungkin berasal dari:

- 1) perubahan tarif pajak atau peraturan pajak;
- 2) pengkajian kembali nilai aset pajak tangguhan yang dapat dipulihkan;
- 3) perubahan cara pemulihan suatu aset.

2.6 Laporan Keuangan

2.6.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Fahmi (2014:2) pengertian dari laporan keuangan adalah :

“Suatu system yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

2.6.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2013:126) tujuan umum laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan dengan maksud:
 - a. untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan;
 - b. untuk menunjukkan posisi keuangan dan investasinya;
 - c. untuk menilai kemampuannya untuk menyelesaikan utang-utangnya.
2. Menunjukkan kemampuan sumber-sumber kekayaannya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan.
3. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan maksud:
 - a. memberikan gambaran tentang deviden yang diharapkan pemegang saham;

- b. menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membiayai kewajiban kepada kreditor, supplier, pegawai, pajak, mengumpulkan dana untuk perluasan perusahaan;
 - c. memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan;
 - d. menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan mendapatkan laba dalam jangka panjang.
4. Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
 5. Memberikan informasi yang diperlukan tentang perubahan harta dan kewajiban mengungkapkan informasi yang relevan yang dibutuhkan para pemakai laporan.

2.6.3 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Dalam B. Ilyas dan Priantara (2014: 26). Undang-undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) menyatakan WP badan dan Orang Pribadi yang wajib pembukuan harus melampirkan laporan keuangan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. KUP menyatakan bahwa pembukuan yang dilakukan akan membentuk suatu Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba/Rugi komperhensif yang akan dilampirkan pada SPT.

Perhitungan PPh Badan atau Orang Pribadi setiap akhir tahun didasarkan atas Laporan Keuangan Fiskal (Laba Rugi Fiskal). Laba rugi fiskal atau menurut ketentuan perpajakan adalah penghasilan Kena Pajak disusun atau diperoleh bukan karena WP menyelenggarakan sistem akuntansi fiskal, tetapi laba rugi fiskal disusun berdasarkan laba rugi komersial atau laba (rugi) bersih menurut SAK yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan (melalui rekonsiliasi). Rekonsiliasi (penyesuaian) tersebut akan berakibat adanya koreksi fiskal, baik koreksi positif yang menambah Penghasilan Kena Pajak atau koreksi negatif yang mengurangi Penghasilan Kena Pajak. Hal-hal yang menyebabkan adanya koreksi fiskal atas laba rugi komersial:

- a. adanya perbedaan antara SAK dan Peraturan Perpajakan yakni perbedaan

- konsep, pengukuran, metode pengalokasian/ saat pengakuan biaya;
- b. adanya penghasilan tertentu yang bukan merupakan objek pajak; atau telah dikenakan PPh bersifat final (*Official Assesment System*);
 - c. adanya kompensasi kerugian fiskal;
 - d. adanya harga yang tidak wajar karena hubungan istimewa.

2.7 Rekonsiliasi Fiskal

Perusahaan menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan menyusun laporan keuangan fiskal secara ekstra komtabel melalui proses rekonsiliasi. Seperti yang telah dinyatakan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam pasal 2 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep. 214/PJ/2001 tanggal 15 Maret 2001, dengan tegas dinyatakan bahwa salah satu dokumen lain yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan adalah rekonsiliasi laba rugi fiskal, baik pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan maupun Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan melakukan proses rekonsiliasi fiskal ini maka WP tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat 1 pembukuan yang didasari SAK-ETAP. Koreksi fiskal tersebut dapat dibedakan antara beda tetap dan beda waktu (Agoes dan Trisnawati 2014:238).

2.7.1 Teknik Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Resmi dalam Yolina (2018) teknik rekonsiliasi fiskal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang menambah laba menurut akuntansi.
3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi pajak tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
4. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

2.7.2 Koreksi Positif dan Negatif Dari Rekonsiliasi Fiskal

Resmi dalam Yolina (2018), Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan negatif. Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya, sebagai berikut:

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak/non deductible expense – Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
3. Amortisasi lebih besar dari amortisasi fiskal.
4. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut:

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak – Pasal 4 Ayat (3) UU PPh.
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final – Pasal 4 Ayat (2) UU PPh.
3. Penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal.
4. Amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal.
5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
6. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

2.8. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Singkiati, Inasa (2015)	Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak dan Perencanaan pajak terhadap Manajemen Laba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aset Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 2. Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 3. Perencanaan Pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
2	Timuriana, Tiara dan Muhamad Rezwan Rizki (2015)	Pengaruh Aset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak terhadap Manajemen Laba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aset Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba 2. Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 3. Aset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba
3	Mettawidya, Stella (2015)	Analisis pengaruh aset pajak tangguhan, asimetri informasi, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. aset pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 2. asimetri informasi dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

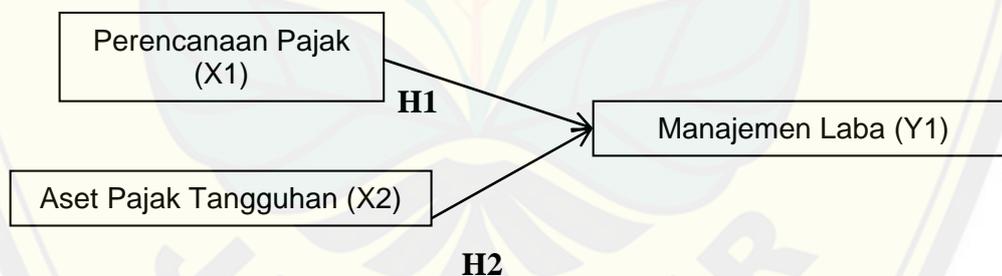
4	Mayangsari, Ika (2015)	Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Discretionary Accrual, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba. .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aset Pajak Tangguhan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap praktik manajemen laba, 2. Discretionary Accrual memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap praktik manajemen laba, 3. Leverage memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik manajemen laba 4. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik manajemen laba, 5. Perencanaan Pajak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap praktik manajemen laba.
5	Lucy Citra Fitriany (2016)	Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Aset pajak tangguhan dan Perencanaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Manajemen laba 2. Beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

6	Purba, Margaretha Angela (2016)	Pengaruh Aset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2011-2014	1. Aset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 2. Beban Pajak Tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.
7	Alawiyah, Tuti (2017)	Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba	3. Aset Pajak Tangguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 4. Beban Pajak Tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba 5. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 6. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba
8	Adetya, Lilah (2018)	Pengaruh Aset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba	1. Aset Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 2. Beban Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
9	Rini, Dwi Septi (2018)	Pengaruh Perencanaan pajak dan Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur	1. Perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

		yang terdaftar di BEI		2. Aset Pajak Tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba
10	Utami, Julyta, Manik, Tumpal, dan Husna Asmaul (2018)	Pengaruh Perusahaan, Aset Tangguhan, Dan Terhadap Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2014-2016	Ukuran Aset Pajak Dan Akrua	1. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba 2. Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, dan Akrua tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.9. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.10. Pembahasan Hipotesis

Bagian ini akan menjelaskan hubungan variabel independen dengan variabel dependen yang akan memberikan kesimpulan berupa perumusan hipotesis.

2.10.1 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Faktor pertama yang diuji pengaruhnya terhadap manajemen laba adalah

perencanaan pajak. Dalam praktek sebuah perencanaan pajak mengindikasikan adanya upaya meminimalkan pajak oleh seorang manajemen (*agent*) agar mendapatkan laba yang menguntungkan namun dilain pihak pemegang saham (*principal*) menginginkan hasil laporan yang baik yang mencerminkan keadaan laba yang besar untuk kesejahteraannya. Disinilah timbul adanya perbedaan antara dua belah pihak dan menimbulkan kemungkinan adanya perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajemen demi memuaskan keinginannya.

Perencanaan pajak sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen untuk merencanakan pajak yang akan dibayar menjadi hal yang sangat penting, jika manajemen menginginkan pajak yang dikenakan seminimal mungkin dengan melakukan perencanaan pajak, maka selaras dengan bentuk manajemen laba dengan cara melakukan minimalisasi laba untuk mengecilkan kewajiban perpajakan perusahaan pada periode ini. Maka penulis menduga bahwa dengan melakukan perencanaan pajak akan berpengaruh dengan praktik manajemen laba.

Dari penelitian Fitriany (2016) menyimpulkan bahwa perencanaan pajak yang tinggi dapat mengindikasikan adanya praktik manajemen laba yang tinggi pula. Selain itu peneliti selanjutnya juga mendukung kesimpulan tersebut Mayangsari (2015), dan Rini (2018) berpendapat dalam penelitiannya adanya pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba

2.10.2 Pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Faktor kedua yang diuji pengaruhnya terhadap manajemen laba adalah aset pajak tangguhan. Menurut PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan menjelaskan pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan untuk periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer (waktu) yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Jumlah pajak dari proses rekonsiliasi fiskal menyebabkan koreksi positif sehingga beban pajak komersial lebih kecil daripada beban pajak menurut fiskal menimbulkan aset pajak tangguhan yang menghasilkan hasil rekonsiliasi laba fiskal lebih besar daripada laba menurut

akuntansi, sehingga kelebihannya tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Hal ini selaras dengan Teori akuntansi positif menurut Watts dan Zimmerman dalam Herdawati (2015) yaitu berusaha untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Maksudnya, teori akuntansi positif dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Prediksi yang muncul dikarenakan adanya hubungan keagenan antara manajer dan pihak pemerintah (fiskus) yang turut dalam proses rekonsiliasi yang nantinya juga menjadi dasar pembuatan laporan keuangan perusahaan di akhir periode.

Pemilihan kebijakan akuntansi menurut manajemen untuk aset pajak tangguhan yang bermanfaat dapat mengurangi sejumlah pajak pada periode mendatang sehingga pajaknya kecil namun tetap mendapatkan laba yang besar. Dengan harapan laba yang tinggi ini manajemen berindikasi melakukan manajemen laba. Maka dari itu penulis membuat dugaan sementara mengenai Aset Pajak Tangguhan berpengaruh dengan adanya praktik Manajemen laba.

Hal ini diungkapkan dalam penelitian Fitriany (2015) bahwa besarnya aset pajak tangguhan yang meningkat berpengaruh pada perusahaan melakukan manajemen laba yang juga mengalami peningkatan, serta Timuriana, Rizki (2015), mengungkapkan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2. Aset Pajak Tangguhan berpengaruh pada Manajemen Laba.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif kausal, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan mengungkapkan permasalahan yang bersifat memiliki hubungan sebab akibat antar dua variabel atau lebih. Penelitian ini memiliki variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi (Sugiyono: 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan yang dikaitkan dengan manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Adapun rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni berkaitan dengan penelitian kuantitatif dan menggunakan data-data sekunder.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan data berbentuk angka pada analisis statistik. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa data laporan keuangan perusahaan Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Data yang digunakan diambil dari laman www.idx.co.id tentang laporan keuangan.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2016:80) mendefinisikan populasi sebagai berikut:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh

perusahaan Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan (*annually report*) yang diaudit dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2015 sampai tahun 2017.

Menurut Sugiyono (2016:81) mendefinisikan sampel sebagai berikut.

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus representatif (mewakili)”.

Proses pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:85). Pertimbangan dalam menentukan sampel data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dan mempublikasikan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir dan Per 31 Desember.
2. Perusahaan tidak di-*delisting* selama periode pengamatan.
3. Perusahaan tidak melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi, dan perubahan kelompok usaha.
4. Perusahaan yang menyajikan aset pajak tangguhan pada laporan keuangan pada tahun 2015-2017.
5. Perusahaan melaporkan laporan keuangan dalam satuan mata uang Rupiah (IDR).

3.4 Definisi Operasional Variabel

Konsep dasar dari definisi operasional mencakup pengertian untuk mendapatkan data yang akan dianalisis dengan tujuan untuk mengoperasionalkan konsep-konsep penelitian menjadi variabel penelitian serta cara pengukurannya. Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan dua variabel yaitu variabel terikat (*dependent*) dan variabel bebas (*independent*) sebagai berikut.

3.4.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Sugiyono (2015:39) menyatakan bahwa variabel dependen adalah sebagai berikut:

“Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.”

A. Manajemen Laba (Y)

Dalam penelitian ini, variabel dependen (variabel terikat) yang akan diteliti adalah Manajemen Laba (Y). Pengujian dalam penelitian ini menggunakan ukuran *discretionary accrual* yang diperoleh dari *error term* total akrual dengan menggunakan model Jones (1991) yang telah dimodifikasi oleh Dechow (1995). Model Jones yang telah dimodifikasi ini dipilih karena pada model ini memperhitungkan kas pada operasi, variabel arus kas operasi digunakan untuk mengontrol tingkat kinerja yang ekstrim karena arus kas operasi sangat menentukan besarnya laba yang akan diperoleh di mana semakin besar kas operasi akan menunjukkan kesempatan perusahaan untuk memperoleh laba yang besar sehingga sangat dimungkinkan manajemen laba.

Perhitungan dilakukan dengan menghitung total laba akrual, kemudian memisahkan *nondiscretionary accrual* (tingkat laba akrual yang wajar) dan *discretionary accrual* (tingkat laba akrual yang tidak normal). Total akrual merupakan selisih antara net income dengan *cash flow operation* yang dirumuskan sebagai berikut (Sook, 1998):

$$TA_{it} = N_{it} - CFO_{it} \dots \dots \dots (1)$$

dimana:

$$TA_{it} = \text{Total akrual perusahaan } i \text{ pada tahun } t$$

- N_{it} = Laba bersih (*net income*) perusahaan i pada tahun t
 CFO_{it} = Kas dari operasi (*cash flow operation*) perusahaan i pada tahun t
 Total akrual (TA_{it}) sendiri juga merupakan penjumlahan dari *nondiscretionary accrual* dengan *discretionary accrual* dengan persamaan berikut:
- $$TA_{it} = NDA_{it} + DA_{it} \dots\dots\dots(2)$$

dimana:

- TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t
 NDA_{it} = *Nondiscretionary accrual* perusahaan i pada tahun t
 DA_{it} = *Discretionary accrual* perusahaan i pada tahun t
 Total akrual kemudian dirumuskan oleh Jones (1991) yang imodifikasi oleh Dechow et. Al (1995) sebagai berikut:

$$TA_{it} / A_{it} = \alpha_1(1/A_{it-1}) + \beta_1((\Delta REV_{it} / A_{it-1}) - (\Delta REC_{it} / A_{it-1}) + \beta_2(PPE_{it} / A_{it-1}) + \epsilon_{it} \dots\dots\dots(3)$$

di mana :

- TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t.
 A_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1.
 ΔREV_{it} = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan pada tahun t-1.
 ΔREC_{it} = piutang perusahaan i pada tahun t dikurangi piutang tahun t-1
 PPE_{it} = aktiva tetap perusahaan i pada tahun t.
 ϵ_{it} = *Error term* perusahaan i pada tahun t.

Perhitungan nondiscretionary accrual menurut model Jones yang dimodifikasi kemudian dirumuskan sebagai berikut :

$$NDA_{it} = \alpha_1(1/A_{it-1}) + \beta_1((\Delta REV_{it} / A_{it-1}) - (\Delta REC_{it} / A_{it-1}) + \beta_2(PPE_{it} / A_{it-1}) \dots\dots\dots(4)$$

$$DA_{it} = TA_{it}/A_{it-1}-NDA_{it} \dots\dots\dots(5)$$

di mana :

- DA_{it} = *Discretionary accrual* perusahaan i pada tahun t.
 TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t.

A_{it-1}	= Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1.
ΔREV_{it}	= Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan pada tahun t-1.
ΔREC_{it}	= Piutang perusahaan i pada tahun t dikurangi piutang tahun t-1
PPE_{it}	= Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t.

Ukuran *Discretionary accrual* ditentukan untuk mengetahui batasan terjadinya manajemen laba, ukuran *discretionary accrual* sebagai berikut:

1. Nilai *discretionary accrual* positif ($DA > 0$) maka dapat diasumsikan bahwa suatu perusahaan telah menerapkan *earning management* dengan cara menaikkan pelaporan laba akrual perusahaan (*income increasing accrual*)
2. Nilai *discretionary accrual* negatif ($DA < 0$), maka dapat diasumsikan bahwa suatu perusahaan melakukan *earning management* berupa menurunkan pelaporan laba akrual perusahaan (*income decreasing accrual*).
3. Nilai *discretionary accrual* hasilnya ($DA = 0$) maka perusahaan tidak melakukan *earning management*.
4. *discretionary accrual* yang baik adalah ketika selisih DA tidak terlalu besar tiap tahun.

3.4.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas (*independent variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negatif. Jika terdapat variabel bebas, variabel terikat juga hadir dan dengan setiap unit kegiatan variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam variabel terikat (Sekara & Bougie, 2017). Variabel independen dalam penelitian ini ada 2, yaitu:

A. Perencanaan Pajak (X_1)

Perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *Cash Effective Tax Rate* sebagai salah satu alat ukur perencanaan pajak. Menurut Dyreng, et,al (2008) Cash ETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran

pajak oleh perusahaan karena Cash ETR tidak terpengaruhi dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Perhitungan Cash ETR dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Dyreng, et,al (2008) dalam penelitian Herawati dan Ekawati (2016) sebagai berikut

$$\text{CASH ETR} = \text{Kas yang dibayarkan untuk pajak}_{it} / \text{Pretax Income}_{it}$$

dimana:

CASH ETR = *Cash Effective Tax Rate* perusahaan i pada tahun t.

Kas yang dibayarkan untuk pajak_{it} = kas yang dibayarkan untuk pajak perusahaan i pada tahun t.

*Pretax Income*_{it} = Laba sebelum pajak perusahaan i pada tahun t.

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisis perencanaan pajak dilakukan dengan menghitung perencanaan pajak perusahaan dengan rumus CASH ETR, kemudian setelah diketahui besarnya perencanaan pajak, maka pemberian skor 1 untuk perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dan skor 0 untuk perusahaan yang tidak melakukan perencanaan pajak. Menurut Frank et al., (2009) dalam Fertika (2014) perusahaan yang melakukan perencanaan pajak apabila pajak yang dibayarkan kurang dari 25%.

Tabel 3.1

Kriteria Penilaian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak	Kriteria
CASH ETR < 25% = 1	Melakukan Perencanaan Pajak
CASH ETR > 25% = 0	Tidak Melakukan Perencanaan Pajak

B. Aset Pajak Tangguhan (X2)

Aset Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan (*recovered*) pada periode mendatang dikarenakan adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sejumlah yang dapat di kompensasikan. Menurut Waluyo (2008,217) dalam Utami (2018) Aset Pajak Tangguhan adalah saldo akun

di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang. Penelitian ini menggunakan rumus aset pajak tangguhan dengan mencari aset pajak tangguhan periode t dikurangi dengan aset pajak tangguhan periode t-1 dibagi dengan aset pajak tangguhan periode t.

$$APT = \frac{APT_t - APT_{t-1}}{APT_t}$$

Keterangan

APT : Aset Pajak Tangguhan

APT_t : Aset Pajak Tangguhan perusahaan pada tahun t

APT_{t-1} : Aset Pajak Tangguhan perusahaan pada tahun t-1

Kriteria besarnya batasan untuk mengetahui perusahaan menggunakan aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

- Menentukan aset pajak tangguhan perusahaan properti, real estate dan konstruksi bangunan tahun pengamatan, data ini diperoleh dari neraca.
- Menentukan besaran aset pajak tangguhan dengan cara rumus aset pajak tangguhan dengan mencari aset pajak tangguhan periode t dikurangi dengan aset pajak tangguhan periode t-1 dibagi dengan aset pajak tangguhan periode t
- Menentukan mean perusahaan.
- Menentukan jumlah kriteria yang terdiri atas 3 kriteria yaitu rendah, sedang dan tinggi
- Mencari nilai maksimal dan minimal, kemudian mencari batasan dengan jumlah data (45) dibagi 3 kriteria.

Tabel 3.2

Kriteria Penilaian Aset Pajak Tangguhan

-13,158 s/d -0,009	Rendah
-0,010 s/d 0,181	Sedang
0,182 s/d 0,956	Tinggi

3.5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data

Dalam membuat penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Data yang diperoleh adalah data sekunder berupa informasi laporan keuangan perusahaan properti, real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui laman www.idx.co.id.
- 2) Riset Kepustakaan (*Library Research*)
Riset kepustakaan yakni riset dengan mengumpulkan bahan atau data-data yang ada kaitannya dengan objek pembahasan, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah buku-buku, jurnal akuntansi.
- 3) Dokumentasi
Melakukan pengumpulan data dengan cara menggandakan data yang ada atau dengan cara membuat salinan.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data ini menggunakan bantuan komputer dengan software program IBM SPSS statistic 24 for windows tanpa menggunakan perhitungan manual. Untuk penelitian ini, dilakukan uji sebagai berikut.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan melakukan analisis statisti deskriptif dan uji asumsi klasik. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui dispersi dan distribusi data. Sedangkan uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kelayakan model regresi yang selanjutnya akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik sampel yang digunakan dan variabel penelitian. Analisis statistik deskriptif ini meliputi jumlah, tendensentral (rata-rata, median dan modus), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi.

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model regresi dalam penelitian ini. Uji asumsi terdiri dari uji normalitas, uji autokolerasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedestisitas.

1) Uji normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai eror yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal sehingga, layak dilakukan pengujian secara statistik.

Ghozali (2013:160) menyatakan bahwa uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model sebuah regresi variabel dependen dan independen atau keduanya terdistribusi secara normal. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar data terdistribusi secara normal dalam variabel yang digunakan didalam penelitian ini. Data yang baik yang dapat dipakai dalam suatu penelitian adalah data yang telah terdistribusi secara normal. Uji normalitas bisa dilakukan dengan melihat besaran *Kolmogrov Smirno*.

Data dapat dikatakan telah terdistribusi secara normal jika memenuhi kriteria:

- a. Angka signifikansi (SIG) $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- b. Angka signifikansi (SIG) $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

2) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel yang ada tidak ortogonal.

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya, (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya (Ghozali, 2016). Ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ dapat diartikan tidak terjadi multikoloniearitas, dan sebaiknya apabila nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ makaterjadi multikoloniearitas.
- b. Apabila nilai VIF ≤ 10 dapat diartikan tidak terjadi multikoloniearitas, dan sebaliknya apabila nilai VIF \geq maka terjadi multikoloniearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2016). Uji heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, atau sumbu X adalah residual (Y prediksi $- Y$ sesungguhnya) yang telah di-studentized.

Dasar analisis:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka yang telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik penyebaran diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4) Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokolerasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk menguji autokolerasi dapat dilakukan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk menguji autokolerasi dapat dilakukan dengan melakukan Uji Durbin Watson, (Ghozali, 2013), adalah sebagai berikut:

- a. apabila $0 < d < d_l$, maka ada autokolerasi negatif;
- b. apabila $d_l \leq d \leq d_u$, maka tidak ada keputusan;
- c. apabila $d_u \leq d \leq (4 - d_u)$, maka tidak ada autokolerasi;
- d. apabila $(4 - d_u) \leq d \leq (4 - d_l)$, maka tidak ada keputusan;
- e. apabila $(4 - d_u) < d < 4$, maka ada autokolerasi negatif.

3.7 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan variabel dependen adalah Manajemen Laba dan variabel independen adalah Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 (X_1) + \beta_2 (X_2) + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Manajemen Laba

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel independen Perencanaan pajak

β_2 = Koefisien regresi variabel independen Aset Pajak Tangguhan

X1 = Variabel Perencanaan pajak

X2 = Variabel Aset Pajak Tangguhan

e = Error Term

3.8 Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi mengukur seberapa model dapat menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil

berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas, begitu pula sebaliknya (Ghozali, 2011). Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Nilai R^2 yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen, tapi karena R^2 mengandung kelemahan mendasar yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan model, maka penelitian ini menggunakan adjusted R^2 berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted R^2 semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen dan sebaliknya.

3.9 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dengan menggunakan output SPSS statistic 24. Analisis terhadap variabel dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

3.9.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F adalah uji kelayakan model (*goodness of fit*) yang digunakan untuk menguji apakah regresi yang kita buat atau signifikan atau tidak baik atau non signifikan. Jika model signifikan maka model bisa digunakan untuk prediksi atau peramalan, sebaliknya jika non atau tidak signifikan maka model regresi tidak bisa digunakan untuk peramalan. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, (H_0 di terima).
- b. jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, (H_0 di tolak).

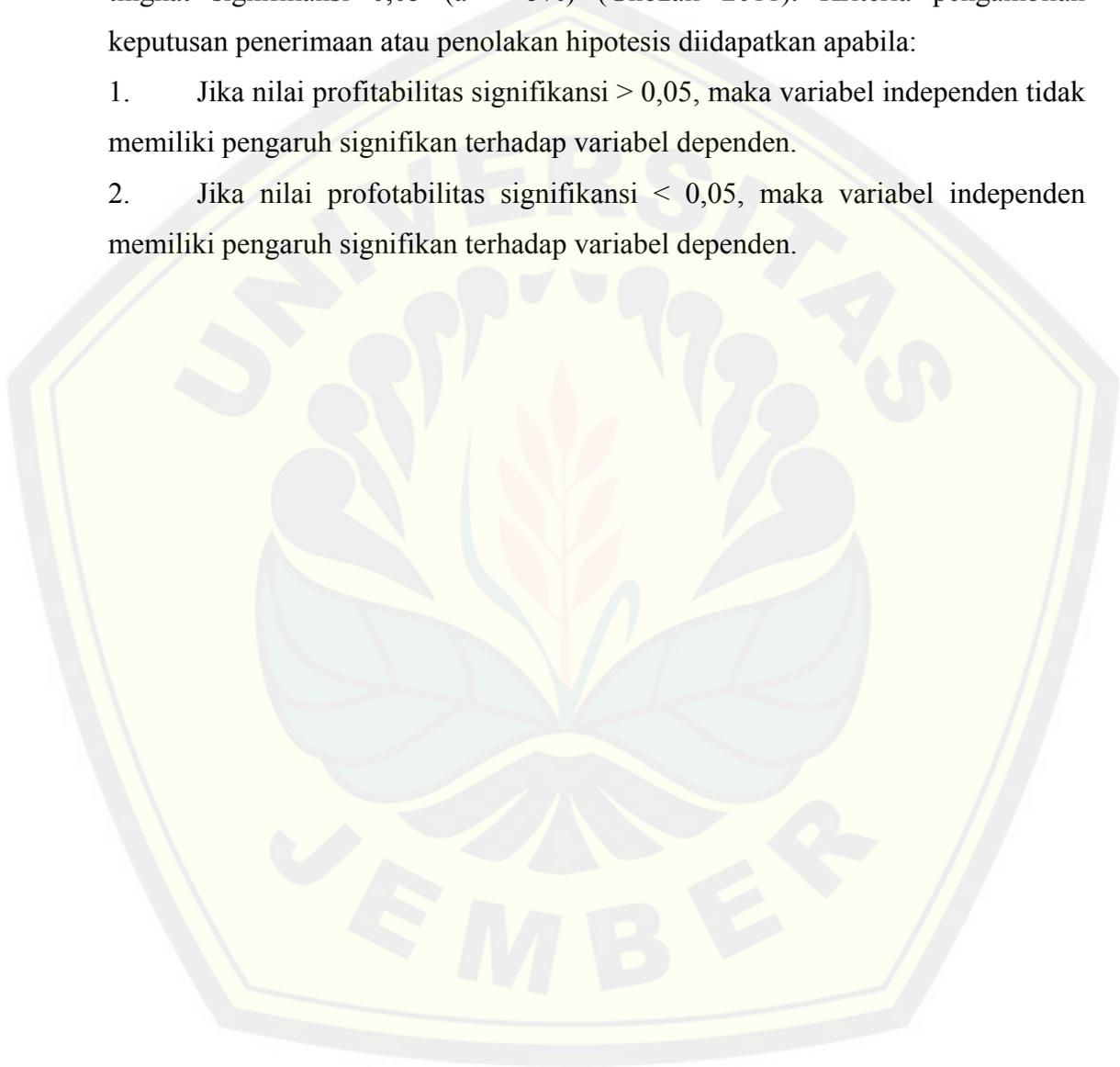
3.9.2 Uji signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. Tujuan dari uji t untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Perhitungan pengambilan keputusan hipotesis dapat dengan cara membandingkan antara hasil uji t_{hitung} dengan t_{tabel} . Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis diterima, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis

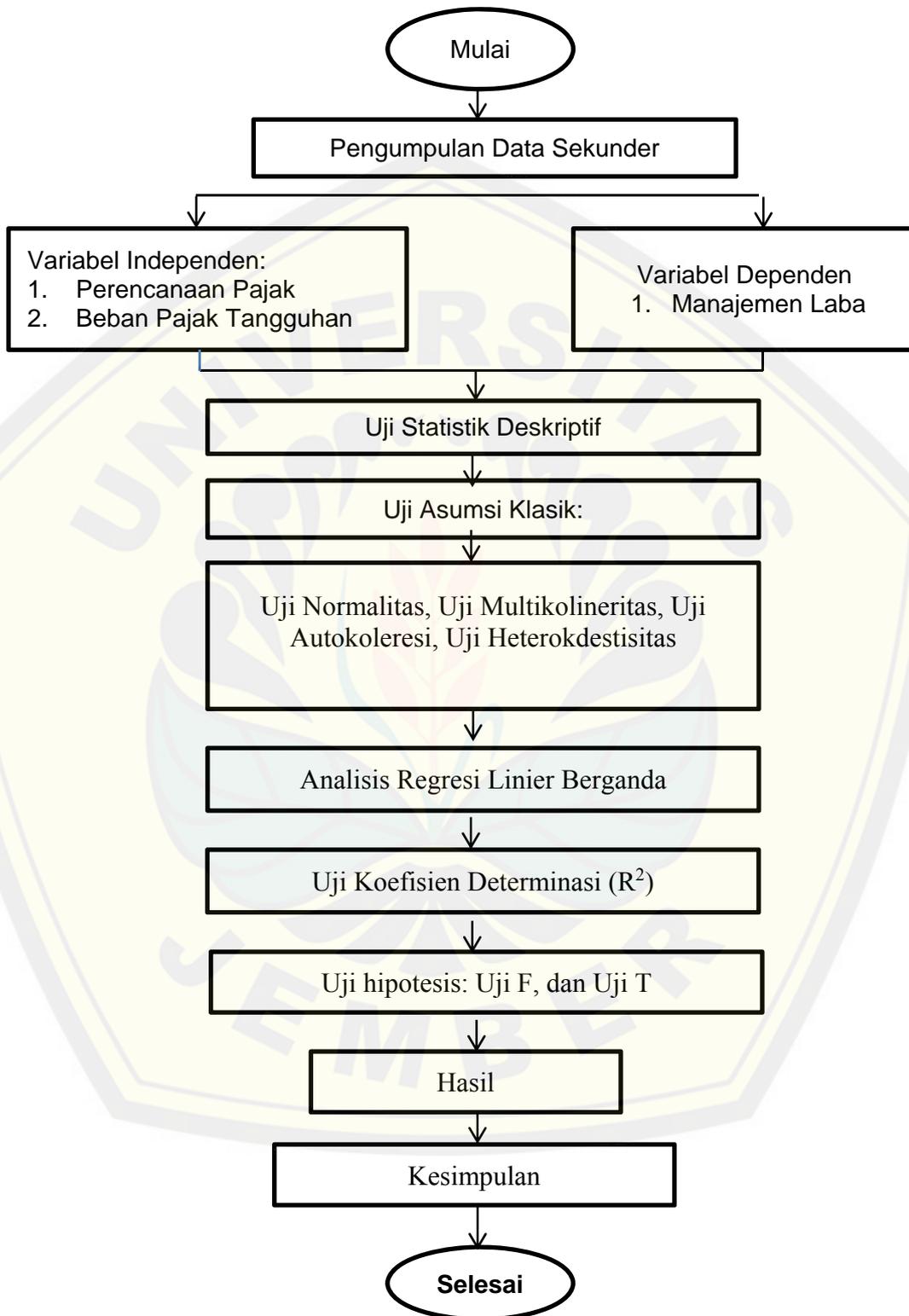
ditolak.

Pada umumnya penelitian menggunakan tingkat signifikansi 1%, 5%, atau 10%. Apabila hipotesis $\alpha = 5\%$ berarti penelitian memiliki keyakinan 100% dari sampel. Berdasarkan teori tersebut, maka pengujian ini dilakukan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) (Ghozali 2011). Kriteria pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis didapatkan apabila:

1. Jika nilai profitabilitas signifikansi $> 0,05$, maka variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai profotabilitas signifikansi $< 0,05$, maka variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.



3.10 Kerangka Pemecahan Masalah



BAB V. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya mengenai pengaruh Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Properti, Real Estate dan Konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Perencanaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Properti, Real Estate dan Konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2017.
2. Aset Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Properti, Real Estate dan Konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2017.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini terletak pada informasi laporan keuangan dalam menganalisis perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan karena perusahaan tidak serta merta menyediakan informasi pajaknya. Serta dalam uji koefisien determinasi menjelaskan bahwa yang mempengaruhi variabel dependen sebesar 30,3%, sedangkan sisanya sebesar 69,7% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain diluar variabel penelitian.

5.3 Saran

1. Bagi manajemen perusahaan Properti, Real Estate dan Konstruksi sebaiknya tidak mengharuskan melakukan perencanaan pajak sebagai salah satu pilihan indikator melakukan manajemen laba. Karena peraturan perpajakan membatasi perencanaan pajak demi untuk konsistensi suatu data.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memilih lebih banyak populasi penelitian, variabel yang digunakan dan memilih model pengukuran variabel lebih baik untuk menjelaskan keterkaitan antar variabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana & Setiawati. 2014. *Perpajakan (Teori dan Peraturan Terkini)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Fahmi, Irham. 2011. *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta
- Fertika. 2014. *Pengaruh Karakteristik Kepemilikan dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Aggressive (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Fitriany. 2016. *Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2013)*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Finola F. 2016. *Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014)*. Bandung: Universitas Widyatama.
- Herdawati. 2015. *Analisis Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia)*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Herawati, Ekawati. 2016. *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan*. Bandung: Universitas Sangga Buana.
- Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009.
- Kustono, Alwan. 2009. *Manajemen Laba (Edisi pertama)*. Jember: Al-Qaswa Technologies
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Edisi Revisi.
- Mardiasmo. 2004. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI
- Meliala, Tulis S. 2007. *Edisi Keempat Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Semesta Media.
- Merlin Yolina, 2018. *Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur*

Subsektor Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). Bandung: Universitas Pasundan.

Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2008. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi.

Pohan, Chairil. 2013. *Manajemen Perpajakan. (Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Pramesti. 2013. *Analisis Perbandingan Manajemen Laba Sebelum Dan Sesudah Reformasi Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Tahun 2009-2010*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Pratama. 2013. *Analisis Pengaruh Good Governance, Leverage dan Kinerja Keuangan Terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2011)*. Jember: Universitas Jember

PSAK No. 46 Pajak Penghasilan. 2010. Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Ikatan Akuntansi Indonesia.

Scott, William R. 2003. *Financial Accounting Theory - Third Edition*. New Jersey : Prentice Hall International, Inc.

Singkiati, Inasa. 2018. *Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Suandy, Early. 2003. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sulistiyanto, H. Sri. 2008. *Manajemen Laba, Teori dan Model Empiris*. Jakarta :Grasindo.

Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks

Sumomba, Christina Ranty dan Hutomo, YB. Sigit. 2012. *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba*. Yogyakarta: Jurnal Kinerja Vol 16, No.2, Hal 103-115.

https://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/propertikomersial/Pages/PPKom_Tw32018.aspx pada 17 Desember 2018

<https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3815604/pengusaha-pasar-konstruksi-ri-diproeksi-capai-rp-451-t-di-2018> pada 15 Januari 2018

LAMPIRAN**Lampiran 1 Daftar Nama Perusahaan Sampel Penelitian**

NO	KODE SAHAM	NAMA PERUSAHAAN
1	BIKA	Binakarya Jaya Abadi Tbk.
2	BKSL	Sentul City Tbk.
3	DILD	Intiland Developmnet Tbk.
4	GMTD	Gowa Makassar Tourism Development Tbk.
5	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk.
6	LPCK	Lippo Cikarang Tbk.
7	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.
8	MDLN	Moderland Realty Tbk.
9	MTLA	Metropolitan Land Tbk.
10	PLIN	Plaza Indonesia Realty Tbk.
11	PUDP	Pudjiati Prestige Tbk.
12	PWON	Pakuwon Jati Tbk.
13	RDTX	Roda Vivatex Tbk.
14	SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk.
15	SSIA	Surya Semesta Internusa Tbk.

Lampiran 2. Perhitungan Manajemen Laba

Data Perusahaan Properti, Real Estate Dan Konstruksi Bangunan Tahun 2015

No	KODE	Ni_{it} (laba bersih)	CFO_{it} (arus kas operasi)	TA
1	BIKA	76.628.133.977	-472.012.528.645	548.640.662.622
2	BKSL	61.673.665.333	-114.457.885.392	176.131.550.725
3	DILD	41.904.419.464	-1057.949.545.935	1.476.993.741.399
4	GMTD	118.494.551.000	-64.143.320.950	182.637.871.950
5	KIJA	331.442.663.161	338.790.021.204	-7.347.358.043
6	LPCK	914.989.279.214	349.056.823.669	565.932.455.545
7	LPKR	1024.121.000.000	-2834.959.000.000	3.859.080.000.000
8	MDLN	873.420.195.958	394.445.454.398	478.974.741.560
9	MTLA	239.982.607	83.562.896	156.419.711
10	PLIN	288.741.530	647973.992	-359.232.462
11	PUDP	27.591.952.360	6.585.396.610	21.006.555.750
12	PWON	1.408.605.517	1.741.992.351	-333.386.834
13	RDTX	258.656.574.637	287.386.681.683	-28.730.107.046
14	SMDM	75.239.795.002	-96.447.927.968	171.687.722.970
15	SSIA	383.182.228.263	180.807.454.825	202.374.773.438

- 1) Ni_{it} = Laba bersih perusahaan i pada tahun t
- 2) CFO_{it} = Kas dari operasi perusahaan i pada tahun t
- 3) TA = Total Akrual

Data Perusahaan Properti, Real Estate Dan Konstruksi Bangunan Tahun 2015

(Dalam ribuan)

NO	KODE	A_{t-1} ⁽¹⁾	Rev_t ⁽²⁾	Rev_{t-1} ⁽³⁾	ΔRev_{it} ⁽⁴⁾	Rec_t ⁽⁵⁾	Rec_{t-1} ⁽⁶⁾	ΔRec_{it} ⁽⁷⁾	PPE_t ⁽⁸⁾
1	BIKA	1733404300	1.013.949.535	957.415.176	56.534.358	28.883.201	12.527.478	16.355.723	186.470.876
2	BKSL	9986973579	559.801.139	712.472.394	-152.671.255	551.551.248	586.613.945	-35.062.697	190.289
3	DILD	9007682018	2.200.900.470	1.827.944.369	372.956.100	235.503.840	115.514.242	119.989.598	225290354
4	GMTD	1524241388	319.045.292	316.638.970	2.406.322	1.199.878	759.421	440.457	3.517.306
5	KIJA	8508937032	3.139.920.233	2.799.065.226	340.855.007	377.001.929	292.109.514	84.892.415	2.192.451
6	LPCK	4390498820	2120553079	1.802.970.419	317.582.659	209660603	65.539.228	144.121.375	80.993.650
7	LPKR	37856376	8.910.177.991	11.655.041.747	-2.744.863	1.434.347	951.103.629	483.243.877	2.731.532
8	MDLN	10359146	2.849.685.595	2.725.007.238	124.678.356	1.485.131	434.514.586	1.050.617	1.128.136
9	MTLA	3250877	1.089.217	1.117.732	-28.514	224.864.840	324.037.076	-99.172.236	363.937
10	PLIN	4544932	1.644.546	1.521.681	122.865	131.425.579	132.547.193	-1.121.614	823.767
11	PUDP	402028832	136.479.911	84.604.863	51.875.047	4.683.658	4.532.016	151.641.764	114.647.213
12	PWON	16770742	4.625.052	3.872.272	752.779	267.679.776	262.955.540	4.724.236	1.457.275
13	RDTX	1643386	422.254.497	431.414.723	-9.160.226	53.823.461	70.093.472	-16.270.010	1.318.804
14	SMDM	3156290	577.756	416.618	161.137	16.745.525	21.219.769	-4.474.244	329.663
15	SSIA	5993292754	4867889109	4464399987	403.489.121	421.218.477	469628387	-48.409.909	1129632103

- 1) A_{t-1} = Total Aktiva perusahaan t-1
- 2) Rev_t = Pendapatan pada tahun t
- 3) Rev_{t-1} = Pendapatan pada tahun t-1
- 4) ΔRev_{it} = Selisih Pendapatan t dengan t-1
- 5) Rec_t = Piutang pada tahun t
- 6) Rec_{t-1} = Piutang pada tahun t-1
- 7) ΔRec_{it} = Selisih Piutang t dengan t-1
- 8) PPE_{it} = Aktiva Tetap perusahaan pada tahun t

Data Perusahaan Properti, Real Estate Dan Konstruksi Bangunan Tahun 2015

NO	KODE	$1/A_{it-1}$	$\frac{\Delta Rev_{it} - \Delta Rec_{it}}{A_{it-1}}$	PPE_{it}/A_{it-1}	TA/A_{it-1}	NDA	DA
1	BIKA	5,76899E-13	0,023179033	0,107574947	0,231060747	-0,02170131	0,233435475
2	BKSL	1,0013E-13	-0,011776196	0,019053792	0,011760103	-0,002374728	0,018904797
3	DILD	1,11016E-13	0,028083418	0,025010913	0,112771847	-0,007144694	0,113310667
4	GMTD	6,56064E-13	0,001289734	0,002307579	0,146966849	-0,00053882	0,196593143
5	KIJA	1,17523E-13	0,030081618	0,257664514	-0,000652152	-0,049626294	0,006356087
6	LPCK	2,27765E-13	0,039508332	0,018447483	0,045719993	-0,007008239	0,050950333
7	LPKR	2,64156E-14	-0,085272493	0,072155149	0,067974919	-0,00523034	0,079505691
8	MDLN	9,6533E-14	-0,089383685	0,108902434	0,032807232	-0,011530772	0,055170454
9	MTLA	3,07609E-10	0,021734901	0,111950556	0,032093796	-0,022363222	0,06756864
10	PLIN	2,20025E-10	0,027280199	0,181249721	-0,077430161	-0,035474844	-0,01368506
11	PUDP	2,48738E-12	0,128655961	0,285171619	0,041610011	-0,063745101	0,061533324
12	PWON	5,96277E-11	0,044604797	0,086893893	-0,01427248	-0,019923313	0,132021974
13	RDTX	6,085E-13	0,004326301	0,80249223	-0,012598373	-0,146294454	0,011243601
14	SMDM	3,16828E-10	0,052470392	0,104446586	0,054648375	-0,023841974	0,095889269
15	SSIA	1,66853E-13	0,075400794	0,188482717	0,022863494	-0,041240894	0,029001656

Data Perusahaan Properti, Real Estate Dan Konstruksi Bangunan Tahun 2016

No	KODE	Ni_{it}	CFO_{it}	TA
1	BIKA	-77.981.341.628	-323.968.983.270	245.987.641.642
2	BKSL	562.426.910.051	-460.393.885.536	1.022.820.795.587
3	DILD	297.350.554.988	-926.263.876.320	1.223.614.431.308
4	GMTD	86.914.558.516	-34.502.194.392	121.416.752.908
5	KIJA	426.542.322.505	543.679.827.246	-117.137.504.741
6	LPCK	539.794.979.877	262.666.659.879	277.128.319.998
7	LPKR	1.227.374.000.000	-558.962.000.000	1.786.336.000.000
8	MDLN	501.349.673.188	684.332.168.821	-182.982.495.633
9	MTLA	316.514.414	307.215.874	9.298.540
10	PLIN	731.181.507	570.054.525	161.126.982
11	PUDP	22.919.928.181	-32.080.933.840	55.000.862.021
12	PWON	1.776.412.002	1.324.703.811	451.708.191
13	RDTX	260.009.476.018	245.793.917.041	14.215.558.977
14	SMDM	20.429.870.704	-46.840.870.762	67.270.741.466
15	SSIA	100.854.847.637	-280.085.173.352	380.940.020.989

- 1) Ni_{it} = Laba bersih perusahaan i pada tahun t
- 2) CFO_{it} = Kas dari operasi perusahaan i pada tahun t
- 3) TA = Total Akruar

Data Perusahaan Properti, Real Estate Dan Konstruksi Bangunan Tahun 2016

(Dalam ribuan)

NO	KODE	A_{t-1} ⁽¹⁾	Rev_t ⁽²⁾	Rev_{t-1} ⁽³⁾	ΔRev_{it} ⁽⁴⁾	Rec_t ⁽⁵⁾	Rec_{t-1} ⁽⁶⁾	ΔRec_{it} ⁽⁷⁾	PPE_t ⁽⁸⁾
1	BIKA	2137499950	631.183.291	1.013.949	-382.766.244	17.956.210	28.883.201	-10.926.991	261.355.821
2	BKSL	11145896809	1.206.574.998	559.801.139	646.773.859	953.215.524	551.551.248	401.664.276	181830997
3	DILD	10288572076	2.276.459.807	2.200.900	75.559.337	165.847.786	235.503.840	-69.656.053	243529148
4	GMTD	1273990253	290.018.897	319.045.292	-29.026.394	263.003.518	1.199.878	-936.874.947	2.987.773
5	KIJA	9740694660	2.931.015.007	3.139.920	-208.905.226	704.332.625	377.001.929	327.330.695	2.307.112.077
6	LPCK	5476757336	1544898127	2120553079	-575.654.951	185285395	209660603	-24.375.207	87631000
7	LPKR	41326558000	10962448000	8910178000	2.052.270.000	1.822.596.000	1.434.348.000	388.248.000	2902208000
8	MDLN	12843050665	2.465.211.935	2.849.685	-384.473.660	2.169.407.729	1.485.131.670	684.276.059	1.174.120.190
9	MTLA	3620742578	1.143.372	1.089.217	54.154.516	187.118.481	224.864.840	-37.746.359	387.873.153
10	PLIN	4671089985	1.659.204	1.644.546	14.658.246	133.996.476	131.425.579	2.570.897	801057679
11	PUDP	445919320	144.016.776	136.479.911	7.536.864	5.079.953	4.683.658	396.295.319	116074557
12	PWON	18778122	4.841.104	4.625.052	216.052	185.527.013	267.679.776	-82.152.763	1.699.652
13	RDTX	1872158609	406.872.943	422.254.497	-15.381.554	48.661.106	53.823.461	-5.162.355	14.487.646
14	SMDM	3154581181	494.722.625	577.756.248	-83.033.622	22.748.580	16.745.524	6.003.056	316.661.074
15	SSIA	6463923464	3796963231	4867889109	-1.070.925.877	284.045.400	421.218.477	-137.173.077	1182205359

1) A_{t-1} = Total Aktiva perusahaan t-12) Rev_t = Pendapatan pada tahun t3) Rev_{t-1} = Pendapatan pada tahun t-14) ΔRev_{it} = Selisih Pendapatan t dengan t-15) Rec_t = Piutang pada tahun t6) Rec_{t-1} = Piutang pada tahun t-17) ΔRec_{it} = Selisih Piutang t dengan t-18) PPE_{it} = Aktiva Tetap perusahaan pada tahun t

Data Perusahaan Properti, Real Estate Dan Konstruksi Bangunan Tahun 2016

NO	KODE	$1/A_{it-1}$	$\frac{\Delta Rev_{it} - \Delta Rec_{it}}{A_{it-1}}$	PPE_{it}/A_{it-1}	TA/A_{it-1}	NDA	DA
1	BIKA	4,67836E-13	-0,173959888	0,122271732	0,102465717	-0,006138162	0,107465709
2	BKSL	8,97191E-14	0,021991015	0,016313716	0,090040955	-0,004999993	0,095649718
3	DILD	9,71952E-14	0,014114242	0,023669869	0,10334529	-0,005608763	0,101732205
4	GMTD	7,84935E-13	-0,022048458	0,002345209	0,098779266	0,001613086	0,136747339
5	KIJA	1,02662E-13	-0,055051097	0,236852931	-0,010913163	-0,037968073	-0,020223874
6	LPCK	1,8259E-13	-0,100658055	0,001600052	0,049021903	0,009310711	0,065513603
7	LPKR	2,41975E-14	0,040265197	0,070226221	0,039170871	-0,0164917	0,048093915
8	MDLN	7,78631E-14	-0,083216188	0,091420662	-0,012584672	-0,008923043	0,009238642
9	MTLA	2,76186E-10	0,025381775	0,107125305	0,002364519	-0,021823314	0,033781498
10	PLIN	2,14083E-10	0,002587693	0,171492667	0,035130174	-0,031416979	0,083935008
11	PUDP	2,24256E-12	0,016013141	0,260303944	0,103546892	-0,048804834	0,121471089
12	PWON	5,32535E-11	0,01588044	0,090512359	0,021848945	-0,017924197	0,022750907
13	RDTX	5,34143E-13	-0,005458511	0,007738471	0,006763665	-0,000901962	0,022402413
14	SMDM	3,16999E-13	-0,028224564	0,100381336	0,021707317	-0,015638747	0,041595548
15	SSIA	1,54705E-13	-0,144456042	0,182892846	0,052941805	-0,019888231	0,061621436

Data Perusahaan Properti, Real Estate Dan Konstruksi Bangunan Tahun 2017

No	KODE	$Ni_{it}^{(1)}$	$CFO_{it}^{(2)}$	TA ⁽³⁾
1	BIKA	-44354027.770	-140994069.753	96.640.041.983
2	BKSL	468.559.181.741	451.061.312.047	17.497.869.694
3	DILD	271.536.513.339	-535.635.578.919	807.172.092.258
4	GMTD	68.230.259.472	1.877.319.620	66.352.939.852
5	KIJA	149.840.578.536	629.665.039.483	-479.824.460.947
6	LPCK	368.440.000.000	-3427.301.000.000	3.795.741.000.000
7	LPKR	856.984.000.000	-4507.226.000.000	5.364.210.000.000
8	MDLN	614.773.608.046	685.294.026.813	-70.520.418.767
9	MTLA	551.010.785	212.558.818	338.451.967
10	PLIN	286.288.858	452.413.654	-166.124.796
11	PUDP	6.018.020.897	55.237.701.512	-49.219.680.615
12	PWON	2.024.627.040	2.258.239.457	-233.612.417
13	RDTX	246.909.721.574	254.500.875.679	-7.591.154.105
14	SMDM	19.737.381.645	15.845.268.138	3.892.113.507
15	SSIA	1.241.357.001.429	-265.358.621.579	1.506.715.623.008

- 1) Ni_{it} = Laba bersih perusahaan i pada tahun t
- 2) CFO_{it} = Kas dari operasi perusahaan i pada tahun t
- 3) TA = Total Akreal

Data Perusahaan Properti, Real Estate Dan Konstruksi Bangunan Tahun 2017

(Dalam Ribuan)

NO	KODE	A_{t-1} ⁽¹⁾	Rev_t ⁽²⁾	Rev_{t-1} ⁽³⁾	ΔRev_{it} ⁽⁴⁾	Rec_t ⁽⁵⁾	Rec_{t-1} ⁽⁶⁾	ΔRec_{it} ⁽⁷⁾	PPE_t ⁽⁸⁾
1	BIKA	2400682388	482.386.824	631.183.291	-148.796.466	13.244.038	17.956.210	-4.712.171	187.922.618
2	BKSL	11359506311	1.623.484.966	1.206.574.998	416.909.967	1.238.609.484	953.215.524	285.393.959	29.877.730
3	DILD	11840059936	2.202.820.510	2.276.459.807	-73.639.296	171.636.080	165.847.786	5788294	228.689.596
4	GMTD	1229172450	237.267.562	290.018.897	-52.751.335	1.600.560.456	263.003.518	1.337.556	2.097.606
5	KIJA	10733598205	2.994.759.224	2.931.015.007	63.744.216	373.830.607	704.332.625	-330502017	2.369.819.209
6	LPCK	5653153000	1501178000	1544898000	-43.720.000	248.008.395	185285395	62.723.000	99723000
7	LPKR	45603683000	11064119000	10962448000	101.671.000	2.262.430.000	1.822.596.000	439.834.000	3854458000
8	MDLN	14540108285	3.195.904.064	2.465.211.935	730.692.129	745.075.044	2.169.407.729	-1424332685	1.322.677.200
9	MTLA	3932529273	1.263.595	1.143.372	120.223.058	312.760.134	187.118.481	125.641.653	372.557.658
10	PLIN	4586569380	1.609.456	1.659.204	-49.747.907	145.178.718	133.996.476	11.182.242	786.424.758
11	PUDP	531168640	136.120.329	144.016.776	-7.896.446	8.865.953.946	5.079.953	3.786.000	169.401.927
12	PWON	20674141	5.717.537	4.841.104	876.432.766	448.497.029	185.527.013	262.970.016	1.681.938
13	RDTX	2101753788	395.780.873	406.872.943	-11.092.069	9.814.323.378	48.661.106	-38.846.783	15.742.246
14	SMDM	3098989165	465.479.918	494.722.625	-29.242.706	20.616.674.382	22.748.580	-2.131.906	35.679.660
15	SSIA	7195448327	3274150704	3796963231	-522.812.526	319.916.321	284.045.400	35870920	1249898697

- 1) A_{t-1} = Total Aktiva perusahaan t-1
- 2) Rev_t = Pendapatan pada tahun t
- 3) Rev_{t-1} = Pendapatan pada tahun t-1
- 4) ΔRev_{it} = Selisih Pendapatan t dengan t-1
- 5) Rec_t = Piutang pada tahun t
- 6) Rec_{t-1} = Piutang pada tahun t-1
- 7) ΔRec_{it} = Selisih Piutang t dengan t-1
- 8) PPE_{it} = Aktiva Tetap perusahaan pada tahun t

Data Perusahaan Properti, Real Estate Dan Konstruksi Bangunan Tahun 2017

NO	KODE	$1/A_{it-1}$	$\frac{\Delta Rev_{it} - \Delta Rec_{it}}{A_{it-1}}$	PPE_{it}/A_{it-1}	TA/A_{it-1}	NDA	DA
1	BIKA	4,16548E-13	-0,060018058	0,078278834	0,045211717	-0,008679631	0,046760802
2	BKSL	8,8032E-14	0,011577616	0,002630196	0,001569893	-0,001549085	0,004460857
3	DILD	8,4459E-14	-0,006708377	0,019314902	0,078453267	-0,002890963	0,074693184
4	GMTD	8,13555E-13	-0,044004316	0,00170652	0,052082769	0,003760083	0,095619317
5	KIJA	9,31654E-14	0,036730109	0,220785161	-0,049259778	-0,043536548	-0,047794406
6	LPCK	1,76892E-13	-0,018828961	0,017640244	0,693063572	-0,001465373	0,707743672
7	LPKR	2,19281E-14	-0,007415256	0,084520761	0,129800551	-0,0146801	0,160047997
8	MDLN	6,87753E-14	0,148212432	0,090967493	-0,00549094	-0,030247446	0,01160501
9	MTLA	2,54289E-10	-0,001377891	0,094737415	0,093475844	-0,01709595	0,123419192
10	PLIN	2,18028E-10	-0,013284471	0,171462523	-0,035564461	-0,029943348	0,020381827
11	PUDP	1,88264E-12	-0,021993855	0,318923058	-0,110377995	-0,055946288	-0,092842893
12	PWON	4,83696E-11	0,029672949	0,081354676	-0,01244067	-0,017535103	-0,009857478
13	RDTX	4,75793E-13	0,013205502	0,007490053	-0,00405476	-0,002583191	-0,002770823
14	SMDM	3,22686E-13	-0,008748272	0,011513322	0,001233797	-0,001283937	0,025632011
15	SSIA	1,38977E-13	-0,077644008	0,173706855	0,233096142	-0,024398213	0,233096142

Lampiran 3. Perhitungan Perencanaan Pajak

$$\text{CASH ETR} = \text{Kas Yang Dibayarkan Untuk Pajak}_{it} / \text{Pretax Income (EBIT)}_{it}$$

Tahun 2015

No	Nama Perusahaan	Kas yang dibayarkan utk pajak	Pretax Income (EBIT)	CASH ETR	SKOR
1	BIKA	19.401.965.556	77.733.640.392	0,249595483	1
2	BKSL	88.901.958.405	62.046.220.824	1,432834381	0
3	DILD	123.404.458.405	419.201.384.730	0,294379892	0
4	GMTD	12.590.325.062	119.428.639.360	0,105421322	1
5	KIJA	88.030.095.942	345.057.155.483	0,255117434	0
6	LPCK	244.672.572.571	930.517.532.765	0,262942464	0
7	LPKR	607.270.745.153	1284.829.851.140	0,472646821	0
8	MDLN	174.232.141.567	960.109.200.223	0,181471172	1
9	MTLA	70.339.872	242.005.766	0,290653703	0
10	PLIN	6.482.964	272.322.139	0,023806232	1
11	PUDP	13.604.766.744	31.357.352.486	0,433862098	0
12	PWON	365.211.287	1.425.142.011	0,256263084	0
13	RDTX	38.234.915	256.034.229.303	0,000149335	1
14	SMDM	24.615.667.417	76.808.457.570	0,32048121	0
15	SSIA	170.900.037.330	392.243.732.813	0,43569858	0

Tahun 2016

No	Nam Perusahaan	Kas yang dibayarkan utk pajak	Pretax Income (EBIT)	CASH ETR	SKOR
1	BIKA	24.872.252.839	77.013.307.787	0,322960454	0
2	BKSL	35.443214.460	562.390.582.418	0,063022418	1
3	DILD	129.165.337.059	299.286.389.343	0,431577718	0
4	GMTD	6.403.506.994	87.506.296.666	0,073177671	1
5	KIJA	108.955.444.035	512.499.728.216	0,212596101	1
6	LPCK	55.379.961.070	549.870.873.335	0,100714484	1
7	LPKR	540.485	1.557.747	0,346965842	0
8	MDLN	49.653.434.224	550.569.253.448	0,090185629	1
9	MTLA	72.358.173	321.897.943	0,224786068	1
10	PLIN	138.556.393	397.530.958	0,348542397	0
11	PUDP	15.766.014.915	26.424.412.915	0,596645797	0
12	PWON	35.600.305	1.731.763.680	0,020557254	1
13	RDTX	154.341.923	257.364.075.673	0,000599703	1
14	SMDM	18.813.100.914	20.293.655.258	0,927043486	0
15	SSIA	93.031.012.939	93.242.525.917	0,997731582	0

Tahun 2017

No	Nama Perusahaan	Kas yang dibayarkan utk pajak	Pretax Income (EBIT)	CASH ETR	SKOR
1	BIKA	15.469.413.116	-42.099.586.266	-0,367448103	0
2	BKSL	11.166.936.768	468.310.371.708	0,023845162	1
3	DILD	87.348.768.009	172.672.760.091	0,505863044	0
4	GMTD	3.906.753.480	68.803.466.028	0,056781347	1
5	KIJA	96.496.390.056	130.079.893.294	0,741824025	0
6	LPCK	129.892.000.000	380.748.000.000	0,341149527	0
7	LPKR	573.721.000.000	1167.129.000.000	0,491566057	0
8	MDLN	127.730.139.246	676.791.362.305	0,188728974	1
9	MTLA	56.001.748	553.270.027	0,101219559	1
10	PLIN	107.404.392	280.440.687	0,382984342	0
11	PUDP	9.258.075.975	539.6911756	1,715439569	0
12	PWON	359.037.209	2.071.691.771	0,173306287	1
13	RDTX	43.466.786	249.142.489.265	0,000174466	1
14	SMDM	11.328.731.079	20.411.316.085	0,555022079	0
15	SSIA	92.709.500.778	1698.096.567.386	0,05459613	1

Lampiran 4. Perhitungan Aset Pajak Tangguhan

$$APT = APT_t - APT_{t-1} / APT_t$$

Tahun 2015

No	Nama Perusahaan	APT t	APT t-1	$\Delta APT_t - APT_{t-1}$	APT
1	BIKA	133.758.668	230.845.580	-97.086.912	-0,725836415
2	BKSL	12.326.414.861	11.190.456.983	1.135.957.878	0,092156389
3	DILD	4.156.165.664	2.608.549.954	1.547.615.710	0,372366223
4	GMTD	87.434.294	103.759.506	-16.325.212	-0,18671406
5	KIJA	37.395.209.536	34.489.907.434	2.905.302.102	0,077691826
6	LPCK	3.479.008.118	3.236.195.984	242.812.134	0,069793495
7	LPKR	46.950.367.278	63.918.907.644	-16.968.540.366	-0,361414433
8	MDLN	255.732.398	218.833.802	36.898.596	0,144285966
9	MTLA	3.401.222	1.936.107	1.465.115	0,430761356
10	PLIN	32.580.548	29.934.356	2.646.192	0,081219997
11	PUDP	10.234.681.621	10.428.999.231	-194.317.610	-0,01898619
12	PWON	65.909.474	17.251.911	48.657.563	0,738248389
13	RDTX	1.709.710.123	1.562.289.464	147.420.659	0,086225529
14	SMDM	1.033.216	1.400.866	-367.650	-0,355830727
15	SSIA	23.133.500.851	18.944.973.309	4.188.527.542	0,181058957

Tahun 2016

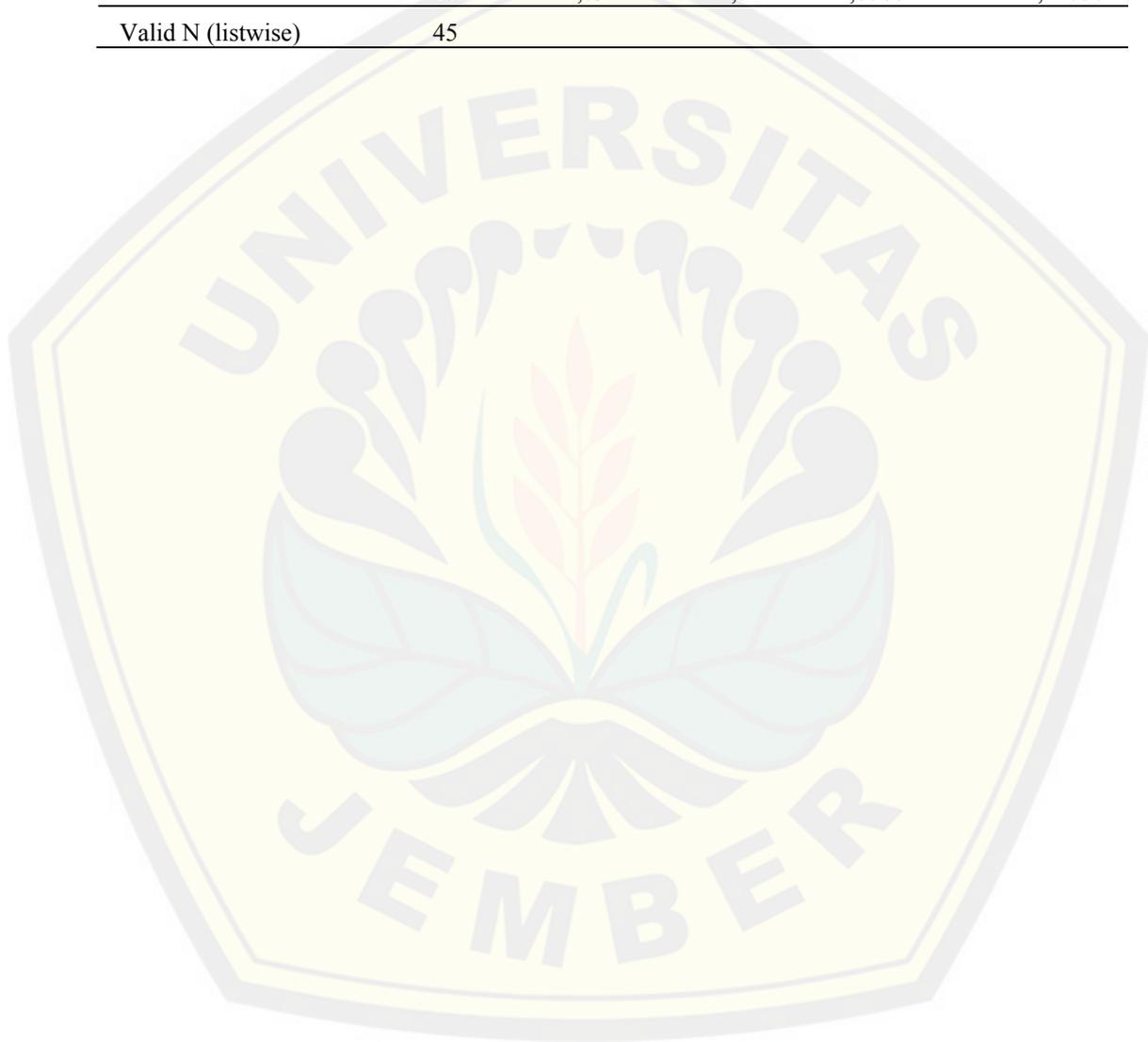
No	Nama Perusahaan	APT t	APT t-1	$\Delta APT_t - APT_{t-1}$	APT
1	BIKA	342.966.259	133.758.668	209.207.591	0,609994673
2	BKSL	13.272.993.949	12.326.414.861	946.579.088	0,07131617
3	DILD	4.580.939.958	4.156.165.664	424.774.294	0,092726449
4	GMTD	131.162.998	87.434.294	43.728.704	0,333392074
5	KIJA	23.254.679.371	37.395.209.536	-14.140.530.165	-0,608072463
6	LPCK	9.860.000.000	3.479.008.118	6.380.991.882	0,64715942
7	LPKR	41129.000.000	46.950.367.278	-5.821.367.278	-0,141539237
8	MDLN	260.801.457	255.732.398	5.069.059	0,019436467
9	MTLA	260.886.000	3.401.222.000	-3.140.336.000	-12,03719632
10	PLIN	349.108.189	32.580.548	316.527.641	0,906674925
11	PUDP	10.133.960.490	10.234.681.621	-100.721.131	-0,00993897
12	PWON	61.899.876	65.909.474	-4.009.598	-0,064775542
13	RDTX	1.774.120.974	1.709.710.123	64.410.851	0,036305783
14	SMDM	2.039.306	1.033.216	1.006.090	0,493349208
15	SSIA	40.656.613.060	23.133.500.851	17.523.112.209	0,431002754

Tahun 2017

No	Nama Perusahaan	APT t	APT t-1	$\Delta APT_t - APT_{t-1}$	APT
1	BIKA	250.552.649	342.966.259	-92.413.610	-0,368839086
2	BKSL	14.109.839.054	13.272.993.949	836.845.105	0,05930933
3	DILD	106.066.573.587	4.580.939.958	101.485.633.629	0,95681071
4	GMTD	191.184.649	131.162.998	60.021.651	0,313945975
5	KIJA	28.621.841.359	23.254.679.371	5.367.161.988	0,187519801
6	LPCK	12.451.000.000	9.860.000.000	2.591	0,208095735
7	LPKR	56.297.000.000	41.129.000.000	15	0,269428211
8	MDLN	279.862.103	260.801.457	19.060.646	0,068107278
9	MTLA	247.093.000.000	260.886.000.000	-13.793	-0,055821088
10	PLIN	358.619.303	349.108.189	9.511.114	0,026521478
11	PUDP	11.620.834.321	10.133.960.490	1.486.873.831	0,127948974
12	PWON	59.303.146	61.899.876	-2.596.730	-0,04378739
13	RDTX	1.588.632.171	1.774.120.974	-185.488.803	-0,11676007
14	SMDM	3.341.311.161	2.039.306.965	1.302.004.196	0,389668646
15	SSIA	2.871.625.979	40.656.613.060	-37.784.987.081	-13,15804612

Lampiran 5. Uji Statistik Diskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	45	0	1	,44	,503
X2	45	-13,16	,96	-,4385	2,67655
Y	45	-,09	,71	,0760	,11737
Valid N (listwise)	45				



Lampiran 6. Uji Asumsi Klasik

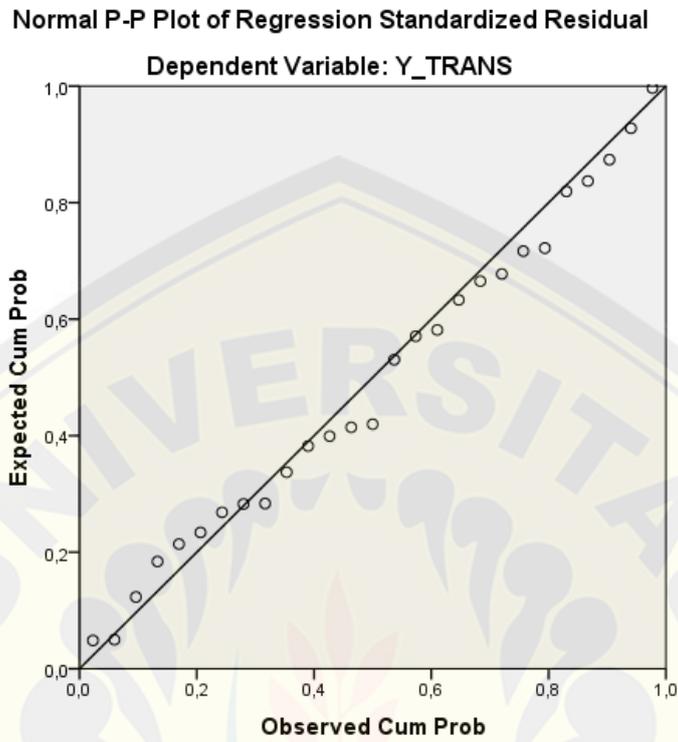
Uji Normalitas sebelum transformasi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		X1	X2	Y
N		45	45	45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,44	-,4385	,0760
	Std. Deviation	,503	2,67655	,11737
Most Extreme Differences	Absolute	,367	,421	,191
	Positive	,367	,301	,191
	Negative	-,310	-,421	-,162
Test Statistic		,367	,421	,191
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c	,000 ^c	,000 ^c
a. Test distribution is Normal.				
b. Calculated from data.				
c. Lilliefors Significance Correction.				

Setelah Data ditransformasi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		27
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,39776135
Most Extreme Differences	Absolute	,102
	Positive	,102
	Negative	-,063
Test Statistic		,102
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Grafik Plot

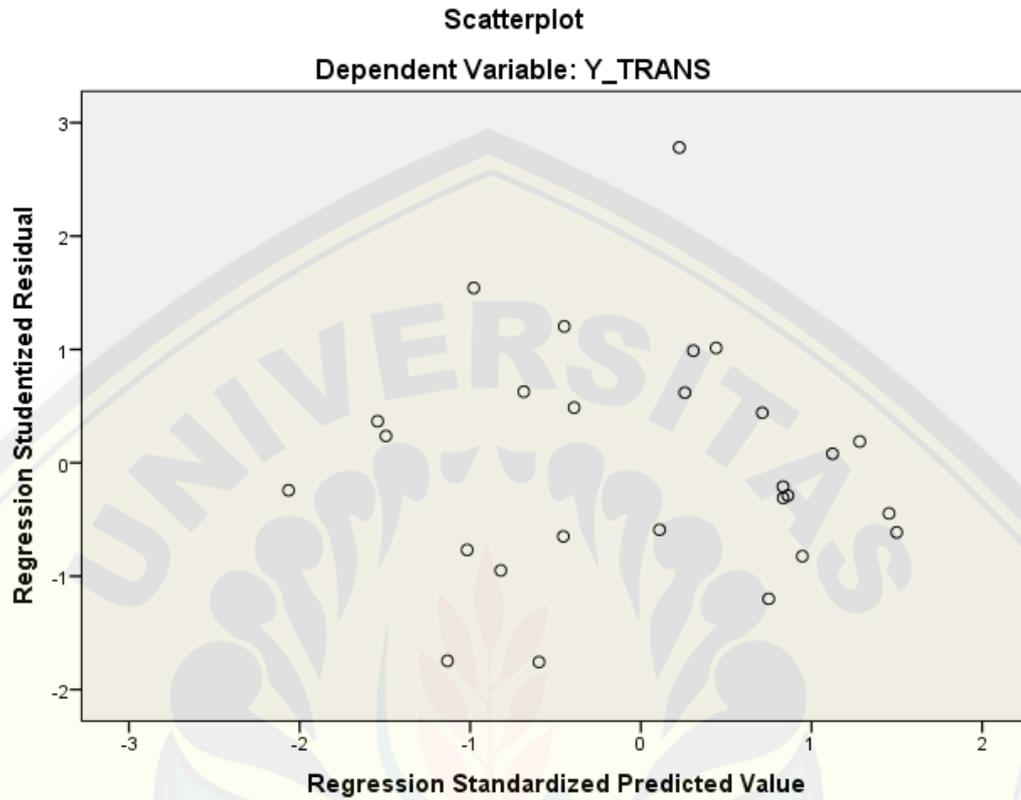


Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,878	,148		-5,932	,000		
	X1	-,092	,179	-,091	-,516	,611	,853	1,172
	APT_TRANS	,570	,181	,556	3,139	,004	,853	1,172

a. Dependent Variable: Y_TRANS

Uji heteroskedastisitas



Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,597 ^a	,357	,303	,41400	1,489

a. Predictors: (Constant), APT TRANS, X1

b. Dependent Variable: Y_TRANS

Lampiran 7. Regresi Linier Berganda

		Coefficients^a						
Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.	Collinearity	
		Coefficients		Coefficients			Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-,878	,148		-5,932	,000		
	X1	-,092	,179	-,091	-,516	,611	,853	1,172
	APT_TRANS	,570	,181	,556	3,139	,004	,853	1,172

a. Dependent Variable: Y_TRANS

Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,597 ^a	,357	,303	,41400	1,489

a. Predictors: (Constant), APT_TRANS, X1
b. Dependent Variable: Y_TRANS

Uji F

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,282	2	1,141	6,658	,005 ^b
	Residual	4,114	24	,171		
	Total	6,396	26			

a. Dependent Variable: Y_TRANS
b. Predictors: (Constant), APT_TRANS, X1

Uji T

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	-,878	,148		-5,932	,000		
X1	-,092	,179	-,091	-,516	,611	,853	1,172
APT_TRANS	,570	,181	,556	3,139	,004	,853	1,172

a. Dependent Variable: Y_TRANS

